



SALINAN

BUPATI LIMA PULUH KOTA  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA  
NOMOR 28 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah, sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota;
  - b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, perlu menyusun Rencana Kerja Perangkat daerah Tahun 2025;
  - c. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lima Puluh Kota di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1);

8. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
5. Pembangunan adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah rencana kerja Perangkat Daerah di lingkup Pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota.
10. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran PD.
12. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.

13. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah.
14. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.

## Pasal 2

Maksud Renja PD adalah untuk menjabarkan Program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKPD Tahun 2025 sesuai dengan urusan dan kewenangan PD.

## Pasal 3

Tujuan disusunnya Renja PD adalah untuk :

- a. memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf PD dalam melaksanakan Program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2025;
- b. menjadi pedoman dalam pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi Program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tupoksi pada masing-masing PD; dan
- c. menjadi salah satu acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran PD tahun 2025.

## Pasal 4

(1) Renja PD disusun dengan sistematika:

- a. bab I memuat pendahuluan;
- b. bab II memuat hasil evaluasi Renja PD tahun lalu;
- c. bab III memuat tujuan dan sasaran PD;
- d. bab IV memuat rencana kerja dan pendanaan PD; dan
- e. bab V memuat penutup.

(2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

1. Rencana Kerja Sekretariat Daerah tercantum dalam Lampiran I;
2. Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tercantum dalam Lampiran II;
3. Rencana Kerja Inspektorat Daerah tercantum dalam Lampiran III;
4. Rencana Kerja Dinas Kesehatan tercantum dalam Lampiran IV;
5. Rencana Kerja RSUD dr Achmad Darwis tercantum dalam Lampiran V;
6. Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tercantum dalam Lampiran VI;

7. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tercantum dalam Lampiran VII;
8. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja tercantum dalam Lampiran VIII;
9. Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tercantum dalam Lampiran IX;
10. Rencana Kerja Dinas Sosial tercantum dalam Lampiran X;
11. Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tercantum dalam Lampiran XI;
12. Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tercantum dalam Lampiran XII;
13. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tercantum dalam Lampiran XIII;
14. Rencana Kerja Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah tercantum dalam Lampiran XIV;
15. Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja tercantum dalam Lampiran XV;
16. Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika tercantum dalam Lampiran XVI;
17. Rencana Kerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga tercantum dalam Lampiran XVII;
18. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari tercantum dalam Lampiran XVIII;
19. Rencana Kerja Dinas Perhubungan tercantum dalam Lampiran XIX;
20. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman tercantum dalam Lampiran XX;
21. Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan tercantum dalam Lampiran XXI;
22. Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan tercantum dalam Lampiran XXII;
23. Rencana Kerja Dinas Perikanan tercantum dalam Lampiran XXIII;
24. Rencana Kerja Dinas Pangan tercantum dalam Lampiran XXIV;
25. Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tercantum dalam Lampiran XXV;
26. Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah tercantum dalam Lampiran XXVI;
27. Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tercantum dalam Lampiran XXVII;
28. Rencana Kerja Badan Keuangan tercantum dalam Lampiran XXVIII;
29. Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tercantum dalam Lampiran XXIX;
30. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tercantum dalam Lampiran XXX;

31. Rencana Kerja Kecamatan Gunuang Omeh tercantum dalam Lampiran XXXI;
32. Rencana Kerja Kecamatan Bukik Barisan tercantum dalam Lampiran XXXII;
33. Rencana Kerja Kecamatan Suliki tercantum dalam Lampiran XXXIII;
34. Rencana Kerja Kecamatan Guguk tercantum dalam Lampiran XXXIV;
35. Rencana Kerja Kecamatan Mungka tercantum dalam Lampiran XXXV;
36. Rencana Kerja Kecamatan Akabiluru tercantum dalam Lampiran XXXVI;
37. Rencana Kerja Kecamatan Payakumbuh tercantum dalam Lampiran XXXVII;
38. Rencana Kerja Kecamatan Luak tercantum dalam Lampiran XXXVIII;
39. Rencana Kerja Kecamatan Lareh Sago Halaban tercantum dalam Lampiran XXXIX;
40. Rencana Kerja Kecamatan Situjuah Limo Nagari tercantum dalam Lampiran XL;
41. Rencana Kerja Kecamatan Harau tercantum dalam Lampiran XLI;
42. Rencana Kerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru tercantum dalam Lampiran XLII; dan
43. Rencana Kerja Kecamatan Kapur IX tercantum dalam Lampiran XLIII.

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

- (1) Kepala PD menyusun Renja PD dengan berpedoman kepada RKPD Tahun 2025 dan Rencana Strategis PD.
- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan penjabaran dari RKPD.

#### Pasal 6

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja PD dilakukan oleh masing-masing Kepala PD.

#### Pasal 7

Perubahan Renja PD Tahun 2025 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Perubahan Renja PD Tahun 2025 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak  
pada tanggal 31 Desember 2024

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

ttd

SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

Diundangkan di Sarilamak  
pada tanggal 31 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

ttd

HERMAN AZMAR  
BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
TAHUN 2024 NOMOR 28



LAMPIRAN VII  
PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA  
NOMOR 28 TAHUN 2024  
TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

**RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM  
DAN PENATAAN RUANG TAHUN 2025**



DAFTAR ISI

|  | Hal   |
|--|-------|
| Daftar Isi   | i     |
| Daftar Tabel   | ii    |
| <br>   |       |
| BAB I : PENDAHULUAN .....  | I-1   |
| 1.1 Latar Belakang .....   | I-1   |
| 1.2 Landasan Hukum .....   | I-2   |
| 1.3 Maksud dan Tujuan .....  | I-3   |
| 1.4 Sistematika Penulisan .....  | I-3   |
| <br>   |       |
| BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN<br>PENATAAN RUANG TAHUN 2023 .....                | II-1  |
| 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Renstra<br>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ..... | II-1  |
| 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan<br>Ruang .....                                | II-11 |
| 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas<br>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang .....          | II-12 |
| 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD .....  | II-13 |
| 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....  | II-25 |
| <br>   |       |
| BAB III : TUJUAN DAN SASARAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN<br>PENATAAN RUANG .....                                  | III-1 |
| 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .....   | III-1 |
| 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan<br>Ruang .....                                  | III-1 |
| 3.3 Program dan Kegiatan .....   | III-2 |
| <br>   |       |
| BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PEKERJAAN UMUM<br>DAN PENATAAN RUANG .....                          | IV-1  |
| 4.1 Rencana Kerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun<br>2025 .....                                       | IV-1  |
| 4.2 Pendanaan .....  | IV-28 |
| BAB V : PENUTUP .....  | V-1   |

**DAFTAR TABEL**

|           |   |  |
|-----------|---|--|
| Tabel 2.1 | : | Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Pencapaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum s/d Tahun 2024 Kabupaten Lima Puluh Kota |
| Tabel 2.2 | : | Realisasi program/ kegiatan/ sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan  |
| Tabel 2.3 | : | Realisasi program/ kegiatan/ sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan  |
| Tabel 2.4 | : | Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota   |
| Tabel 2.5 | : | Pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang   |
| Tabel 2.6 | : | Riview terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025 Kabupaten Lima Puluh Kota   |
| Tabel 2.7 | : | Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Lima Puluh Kota  |
| Tabel 3.1 | : | Target Tujuan dan Sasaran Kinerja Renja Tahun 2025   |
| Tabel 3.2 | : | Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026              |
| Tabel 3.3 | : | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Lingkup Urusan Pertanahan   |
| Tabel 3.4 | : | Rekap jumlah program dan kegiatan dalam Renja Tahun 2025   |
| Tabel 4.1 | : | Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025  |
| Tabel 4.2 | : | Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025   |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Menurut Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perencanaan pembangunan daerah disusun secara runut mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Semua jenis perencanaan ini merupakan dokumen perencanaan di tingkat kabupaten.

Untuk tingkatan Perangkat Daerah (PD) juga dilakukan penyusunan perencanaan, yaitu Rencana Strategis PD (Renstra-PD) dengan ruang lingkup waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja PD (Renja-PD) dengan ruang lingkup waktu 1 (satu) tahun.

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota telah melaksanakan penyusunan dan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota No. 10 Tahun 2011 Tentang RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2005-2025 dan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026.

Penyusunan RPJMD ini dilaksanakan dalam rangka menjabarkan RPJPD. Penyusunan RPJMD ini didasari oleh visi dan misi serta Program prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Selanjutnya penyusunan RPJMD ini merupakan penyusunan RPJMD tahap keempat dalam ruang lingkup RPJPD 2005-2025.

Pada tingkatan PD, RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 ini secara lebih teknis dan operasional dijabarkan dalam Renstra PD, dimana muatan yang terkandung dalam Renstra PD adalah visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan diraih oleh PD dengan melaksanakan beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing selama lima tahun ke depan. Program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut tentunya merupakan pelaksanaan sebagian kebijakan dan program kepala daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota 2021-2026. Di samping itu tetap mengacu kepada RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 dan RPJM Nasional.

Terkait dengan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, saat ini telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 yang berfungsi sebagai referensi perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selama lima tahun.

Selanjutnya sebagai salah satu perangkat daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang juga perlu menyusun perencanaan tahunan, yaitu berupa Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Renja Dinas PUPR). Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Oleh Karena itu, sesuai dengan amanah Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa setelah RKPD ditetapkan, Kepala PD harus segera menetapkan Renja PD masing-masing, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang harus segera menyusun dan menetapkan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025.

Proses penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai berikut :

- a. Unit kerja menyusun Renja awal berdasarkan kebutuhan masyarakat, hasil kunjungan lapangan dan usulan Kepala Daerah.
- b. Menampung usulan masyarakat dari hasil kegiatan Musrenbang dan menyaringnya untuk dimasukkan dalam Renja.
- c. Menyatukan Renja dari seluruh unit kerja menjadi Renja PD berdasarkan pagu indikatif dan menyampaikannya ke Bapelitbang Kabupaten Lima Puluh Kota.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan salah satu PD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, sehingga Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang juga bagian dari RKPD. Renja Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025 final tertuang dalam RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025. Renja yang disusun setiap tahun merupakan penjabaran dari Renstra PD yang disusun untuk 5 tahun. Dalam Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025 juga mengusulkan kegiatan yang bersumber dari Dana DAU yang sumber dananya berasal dari Pemerintah Pusat. Renja Tahun 2025 ini akan dijadikan bahan dalam menetapkan KUA PPAS dan penyusunan RAPBD Tahun 2025.

## **1.2. Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5582), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10).
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 1).
12. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 74 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 74).
13. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 120 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 120);
14. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 Nomor 12).

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini adalah untuk :

1. Menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah serta program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang secara operasional dan teknis sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Memberikan gambaran kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2025 sesuai dengan urusan dan kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
3. Menyediakan suatu acuan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum untuk tahun 2025.

Berkaitan dengan maksud di atas Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini ditujukan untuk :

1. Memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2025.
2. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tupoksi sekretariat dan bidang-bidang di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
3. Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun 2025.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025 ini terdiri dari beberapa Bab sebagai berikut :

- I. Pendahuluan, yang berisi penjelasan tentang latar belakang penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.
- II. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, yang berisi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2025.
- III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, yang memuat telaahan terhadap tujuan dan sasaran Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2025.
- IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah, yang memuat Rencana Kerja dan Pagu Indikatif Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2025.
- V. Penutup, yang berisi ketentuan penutup.

**BAB II**  
**HASIL EVALUASI RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
**KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2023**

**2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2023 dan Pencapaian Renstra tahun 2024 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang disajikan sebagaimana terlihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1  
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
dan Pencapaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum s/d Tahun 2024 Kabupaten Lima Puluh Kota

Perangkat Daerah : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

| Kode |   |   |   |   |   | Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan                       | Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)                   | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n - 3) /2022 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun n - 2) / 2023 |   |                       | Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun n - 1) / 2024 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan |  |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|-----------------------|--|--|--|
|      |   |   |   |   |   |   |   |   |  | Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) / 2023                                  | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) / 2023 | Tingkat realisasi (%) |  | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) / 2024   | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1    |   |   |   |   |   | 2   | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8=(7/6)               | 9  | 10=(7+9)   | 11=(10/4)                                    |
|      |   |   |   |   |   | URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR  |   |   |  |   |   |                       |  |  |  |
| 1    | 3 | 1 |   |   |   | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           | Persentase Pelaksanaan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | 100%  | 100%   | 100%  | 100%  | 100%                  | 100%   | 100%   | 100 %  |
| 1    | 3 | 1 | 2 | 1 |   | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Persentase pemenuhan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah          | 100%  | 100%   | 100%  | 100%  | 100%                  | 100%   | 100%   | 100%   |
| 1    | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah dokumen Renstra dan Renja yang disusun (dokumen)                   | 9   | 2  | 1   | 1   | 100%                  | 2  | 3  | 33%  |
| 1    | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah laporan triwulan pengendalian dan evaluasi yang disusun (dokumen)  | 28  | 1  | 5   | 5   | 100%                  | 3  | 8  | 28,5 %                                       |
| 1    | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah dokumen LKjIP, LKPJ yang disusun (dokumen)                         | 14  | 1  | 3   | 3   | 100%                  | 1  | 4  | 28,5 %                                       |
| 1    | 3 | 1 | 2 | 2 |   | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | Persentase penyediaan gaji dan tunjangan ASN serta penyusunan laporan OPD | 100%  | 100%   | 100%  | 100%  | 100%                  | 100%   | 100%   | 28,5 %                                       |
| 1    | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangan (orang)                    | 89  | 76   | 102   | 105   | 107%                  | 102  | 102  | 114%   |
| 1    | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | Jumlah dokumen laporan akhir tahun yang disusun (dokumen) 1q              | 7   | 1  | 2   | 2   | 100%                  | 2  | 4  | 57%  |
| 1    | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                        | Jumlah dokumen laporan prognosis realisasi anggaran yang                  | 7   | 1  | 2   | 2   | 100%                  | 2  | 4  | 51%  |

| Kode |   |   |   |   |    | Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)           | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n - 3) /2022 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun n - 2) / 2023 |   |                       | Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun n - 1) / 2024 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan |  |
|------|---|---|---|---|----|--|---|---|--|---|---|-----------------------|--|--|--|
|      |   |   |   |   |    |  |   |   |  | Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) / 2023                                  | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) / 2023 | Tingkat realisasi (%) |  | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) / 2024   | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1    |   |   |   |   |    | 2  | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8=(7/6)               | 9  | 10=(7+9)   | 11=(10/4)                                    |
|      |   |   |   |   |    |  | disusun (dokumen)   |   |  |   |   |                       |  |  |  |
| 1    | 3 | 1 | 2 | 5 |    | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Persentase pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  | 100%  | 100%   | 100%  | 100%  | 100%                  | 100%   | 100%   | 100%   |
| 1    | 3 | 1 | 2 | 5 | 11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan       | Jumlah aparatur yang telah mengikuti bimtek dan pelatihan (orang) | 92  | 5  | 15  | 0   | 0%                    | 0  | 4  | 4%   |
| 1    | 3 | 1 | 2 | 6 |    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Persentase pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah         | 100%  | 100%   | 100%  | 100%  | 100%                  | 100%   | 100%   | 100%   |
| 1    | 3 | 1 | 2 | 6 | 1  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah komponen instalasi listrik yang diadakan (jenis)           | 30  | 6  | 15  | 15  | 100%                  | 26   | 31   | 103%   |
| 1    | 3 | 1 | 2 | 6 | 2  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia (unit)     | 313   | 0  | 10  | 0   | 0%                    | 38   | 38   | 12%  |
| 1    | 3 | 1 | 2 | 6 | 4  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah alat tulis kantor yang tersedia (jenis)                    | 68  | 15   | 78  | 77  | 98%                   | 66   | 143  | 210 %  |
| 1    | 3 | 1 | 2 | 6 | 5  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Jumlah barang cetak yang tersedia (lembar)                        | 43500   | 825  | 5000  | 5000  | 100%                  | 7300   | 12300  | 28%  |
| 1    | 3 | 1 | 2 | 6 | 6  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         | Jumlah bahan bacaan yang tersedia (jenis)                         | 4   | 5  | 4   | 4   | 100%                  | 4  | 8  | 200%   |
| 1    | 3 | 1 | 2 | 6 | 8  | Fasilitasi Kunjungan Tamu  | Jumlah makanan dan minuman tamu yang disediakan (porsi)           | 35325   | 378  | 5875  | 1679  | 29%                   | 5900   | 7579   | 21 %   |
| 1    | 3 | 1 | 2 | 6 | 9  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah OH yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi (OH)     | 278   | 38   | 44  | 44  | 100%                  | 46   | 90   | 32%  |
| 1    | 3 | 1 | 2 | 8 |    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | 100%  | 100%   | 100%  | 100%  | 100%                  | 100  | 100%   | 100%   |
| 1    | 3 | 1 | 2 | 8 | 1  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   | Jumlah materai yang tersedia (lembar)                             | 9360  | 205  | 260   | 0   | 0%                    | 0  | 0  | 0  |
| 1    | 3 | 1 | 2 | 8 | 2  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          | Jumlah rekening telpon dan listrik yang dibayarkan (rekening)     | 288   | 18   | 48  | 48  | 100%                  | 48   | 96   | 33 %   |



| Kode |   |    |   |   |    | Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)                                      | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n - 3) /2022 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun n - 2) / 2023 |   |                       | Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun n - 1) / 2024 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan |  |
|------|---|----|---|---|----|--|--|---|--|---|---|-----------------------|--|--|--|
|      |   |    |   |   |    |  |  |   |  | Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) / 2023                                  | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) / 2023 | Tingkat realisasi (%) |  | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) / 2024   | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1    |   |    |   |   |    | 2  | 3  | 4   | 5  | 6   | 7   | 8=(7/6)               | 9  | 10=(7+9)   | 11=(10/4)                                    |
| 1    | 3 | 1  | 2 | 8 | 3  | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | Jumlah peralatan kantor yang dipelihara (unit)   | 52  | 19   | 1   | 1   | 100%                  | 50   | 51   | 98%  |
| 1    | 3 | 1  | 2 | 8 | 4  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah tanaga kontrak yang dibayarkan gajinya (orang)  | 28  | 15   | 43  | 43  | 100%                  |  |  |  |
| 1    | 3 | 1  | 2 | 9 |    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan                    | 75%   | 100%   | 100%  | 100%  | 100%                  | 100%   | 100%   | 100%   |
| 1    | 3 | 1  | 2 | 9 | 2  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan       | Jumlah kendaraan yang dibayarkan pajak dan KIR (unit)  | 68  | 2  | 30  | 30  | 100%                  | 66   | 96   | 141%   |
| 1    | 3 | 1  | 2 | 9 | 3  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar  | Jumlah alat berat yang terpelihara (unit)  | 12  | 10   | 11  | 11  | 100%                  | 11   | 22   | 183%   |
| 1    | 3 | 1  | 2 | 9 | 6  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah alat - alat ukur yang terpelihara (unit)  | 10  | 8  | 9   | 0   | 0%                    | 9  | 9  | 90%  |
| 1    | 3 | 1  | 2 | 9 | 9  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | Jumlah pekerjaan pemeliharaan gedung kantor (paket)  | 3   | 0  | 1   | 1   | 100%                  | 0  | 1  | 100%   |
| 1    | 3 | 10 |   |   |    | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN  | Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap                                      | 62,78%  | 55,73%   | 57,05%  | 61,26%  | 107%                  | 59,95%   | 121%   | 192%   |
| 1    | 3 | 10 | 2 | 1 |    | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota   | Panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap   | 691,33  | 674.61   | 645.85  | 660,17  | 107%                  | 59,95  | 720,12   | 104%   |
| 1    | 3 | 10 | 2 | 1 | 1  | Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan | Jumlah dokumen perencanaan pembangunan/ pemeliharaan jalan/ jembatan yang tersusun (dokumen) | 33  | 5  | 5   | 2   | 40%                   | 5  | 7  | 21,2%  |
| 1    | 3 | 10 | 2 | 1 | 4  | Survey Kondisi Jalan/Jembatan  | Jumlah dokumen kondisi eksisting jalan/jembatan yang tersusun (dokumen)                      | 37  | 0  | 6   | 0   | 0%                    | 0  | 0  | 0  |
| 1    | 3 | 10 | 2 | 1 | 8  | Rekonstruksi Jalan   | Panjang jalan yang direkonstruksi (km)   | 107,57  | 34,84  | 13,5  | 12,2  | 90,37                 | 21   | 33,2   | 30%  |
| 1    | 3 | 10 | 2 | 1 | 10 | Pemeliharaan Berkala Jalan   | Panjang jalan yang terpelihara (km)  | 92,67   | 11,54  | 13  | 7   | 53,8%                 | 14   | 21   | 22%  |
| 1    | 3 | 10 | 2 | 1 | 11 | Pemeliharaan Rutin Jalan   | Panjang jalan yang terpelihara (km)  | 89,8  | 6  | 16,5  | 16,5  | 100%                  | 17   | 33,5   | 37%  |

| Kode |   |    |   |   |    | Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)  | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n - 3) /2022 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun n - 2) / 2023 |   |                       | Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun n - 1) / 2024 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan |  |
|------|---|----|---|---|----|---|--|---|--|---|---|-----------------------|--|--|--|
|      |   |    |   |   |    |   |  |   |  | Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) / 2023                                  | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) / 2023 | Tingkat realisasi (%) |  | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) / 2024   | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1    |   |    |   |   |    | 2   | 3  | 4   | 5  | 6   | 7   | 8=(7/6)               | 9  | 10=(7+9)   | 11=(10/4)                                    |
| 1    | 3 | 10 | 2 | 1 | 12 | Pembangunan Jembatan  | Jumlah jembatan yang terbangun (unit)  | 31  | 1  | 0   | 1   | 100 %                 | 1  | 2  | 6,4%   |
| 1    | 3 | 10 | 2 | 1 | 18 | Rehabilitasi Jembatan   | Jumlah Jembatan yang direhabilitasi (unit)   | 55  | 0  | 12  | 3   | 25%                   | 0  | 3  | 5,5%   |
| 1    | 3 | 10 | 2 | 1 | 21 | Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat  | Terbangunnya Jembatan terdampak Bencana (unit)   | 57  | 0  | 0   | 0   | 0%                    | 0  | 0  | 0  |
| 1    | 3 | 2  |   |   |    | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)   | Persentase luas daerah irigasi dalam kondisi baik  | 81,52   | 44,17  | 78,32   | 79.12   | 101%                  | 79,92  | 159,04   | 195%   |
| 1    | 3 | 2  | 2 | 1 |    | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota  | Persentase Sumber Daya Air yang terkelola/ terpelihara   | 84,62   | 44,17  | 80,12   | 81.25   | 101%                  | 79,92  | 161,17   | 190%   |
| 1    | 3 | 2  | 2 | 1 | 3  | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai        | Jumlah Dokumen Perencanaan Pengendalian Banjir yang tersusun (dokumen)                               | 34  | 8  | 15  | 5   | 33%                   | 3  | 8  | 23,5%  |
| 1    | 3 | 2  | 2 | 1 | 6  | Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya  | Jumlah embung dan penampung air lainnya yang terpelihara (embung)                                    | 41  | 2  | 5   | 5   | 100                   | 2  | 7  | 17%  |
| 1    | 3 | 2  | 2 | 1 | 46 | Normalisasi/Restorasi Sungai  | Jumlah kawasan sungai yang dinormalisasi (kawasan)   | 145   | 27   | 1   | 1   | 100 %                 | 0  | 1  | 0,68%  |
| 1    | 3 | 2  | 2 | 2 |    | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase jaringan irigasi yang terkelola   | 83,08   | 81.22  | 81.25   | 88,50   | 108%                  |  |  |  |
| 1    | 3 | 2  | 2 | 2 | 1  | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa  | Jumlah dokumen perencanaan pembangunan/ pemeliharaan jaringan irigasi / rawa yang tersusun (dokumen) | 34  | 8  | 15  | 5   | 33%                   | 3  | 8  | 23,5%  |
| 1    | 3 | 2  | 2 | 2 | 8  | Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan  | Jumlah jaringan irigasi yang ditingkatkan (jaringan irigasi)   | 208   | 5  | -   | 0   | 0%                    | 0  | 0  | 0  |
| 1    | 3 | 2  | 2 | 2 | 14 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan   | Jumlah jaringan irigasi yang terpelihara   | 175   | 10   | 27  | 11  | 41%                   | 0,65   | 11,65  | 6,65%  |
| 1    | 3 | 2  | 2 | 2 | 21 | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan   | Jumlah jaringan irigasi yang terpelihara (jaringan irigasi)  | 223   | 23   | 40  | 16  | 40 %                  | 0,65   | 11,65  | 6,65%  |

| Kode |   |   |   |   |    | Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)                                       | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n - 3) /2022 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun n - 2) / 2023 |   |                       | Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun n - 1) / 2024 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan |  |
|------|---|---|---|---|----|--|---|---|--|---|---|-----------------------|--|--|--|
|      |   |   |   |   |    |  |   |   |  | Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) / 2023                                  | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) / 2023 | Tingkat realisasi (%) |  | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) / 2024   | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1    |   |   |   |   |    | 2  | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8=(7/6)               | 9  | 10=(7+9)   | 11=(10/4)                                    |
| 1    | 3 | 3 |   |   |    | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM   | Persentase rumah tangga yang memperoleh akses air minum                                       | 90,12   | 81,7   | 84.72   | 85,32   | 100,7%                | 86,42  | 171,74   | 190,5%                                       |
| 1    | 3 | 3 | 2 | 1 |    | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota                       | Jumlah rumah tangga yang mendapatkan layanan air bersih                                       | 61364   | 80111  | 1350  | 1267  | 93,8%                 | 460  | 1727   | 2,8%   |
| 1    | 3 | 3 | 2 | 1 | 4  | Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan   | Jumlah tambahan rumah tangga di kawasan perdesaan yang mendapatkan layanan air bersih (rumah) | 51759   | 519  | 1267  | 1267  | 100%                  | 200  | 1476   | 2,8%   |
| 1    | 3 | 3 | 2 | 1 | 5  | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan   | Jumlah tambahan rumah tangga di kawasan perkotaan yang mendapatkan layanan air bersih (rumah) | 9605  | 0  | 2   | 2   | 100%                  | 0  | 0  | 0  |
| 1    | 3 | 5 |   |   |    | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH   | Persentase rumah tangga yang memperoleh akses sanitasi yang layak                             | 86,85   | 80,05  | 81,65   | 100%  | 100%                  | 83,35%   | 183,33%  | 211%   |
| 1    | 3 | 5 | 2 | 1 |    | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota                            | Jumlah rumah tangga yang memperoleh akses sanitasi yang layak                                 | 59541   | 450  | 234   | 234   | 100%                  | 59231  | 59465  | 99,87  |
| 1    | 3 | 5 | 2 | 1 | 12 | Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman                                 | Jumlah tambahan rumah tangga yang memperoleh akses sanitasi yang layak (rumah)                | 59541   | 450  | 217   | 234   | 108%                  | 59231  | 59465  | 99,87  |
| 1    | 3 | 6 |   |   |    | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE   | Persentase Saluran Drainase dalam kondisi baik  | 52  | 45   | 45  | 0   | 0                     | 0  | 0  | 0  |
| 1    | 3 | 6 | 2 | 1 |    | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota | Panjang saluran drainase primer yg terbangun (m)  | 7402  |  | 4866.8  | 0   | 0%                    | 0  | 0  | 0  |

| Kode |   |    |   |   |   | Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)                                       | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n - 3) /2022 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun n - 2) / 2023 |   |                       | Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun n - 1) / 2024 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan |  |
|------|---|----|---|---|---|--|---|---|--|---|---|-----------------------|--|--|--|
|      |   |    |   |   |   |  |   |   |  | Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) / 2023                                  | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) / 2023 | Tingkat realisasi (%) |  | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) / 2024   | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1    |   |    |   |   |   | 2  | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8=(7/6)               | 9  | 10=(7+9)   | 11=(10/4)                                    |
| 1    | 3 | 6  | 2 | 1 | 1 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan   | Jumlah dokumen perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong yang tersusun (dokumen) | 38  | 6  | 10  | 0   | 0%                    | 0  | 0  | 0  |
| 1    | 3 | 6  | 2 | 1 | 5 | Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan  | Panjang Saluran Drainase yang terbangun (km)  | 38,75   | 6  | 2   | 0   | 0%                    | 2  | 2  |  |
| 1    | 3 | 6  | 2 | 1 | 6 | Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan   | Panjang Saluran Drainase yang ditingkatkan (km)   | 6,51  | 1  | 1   | 0   | 0%                    | 0  | 0  | 0  |
|      |   |    |   |   |   |  |   |   |  |   |   |                       |  |  |  |
| 1    | 3 | 8  |   |   |   | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG   | Persentase Bangunan Gedung yang layak (%)   | 85  | 0.71   | 84,78%  | 0   | 0%                    | 77%  | 77 %   | 90,5%  |
| 1    | 3 | 8  | 2 | 1 |   | Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung                                  | Jumlah gedung yang dibangun dan ditingkatkan (unit)   | 46  | 2  | 18  | 0   | 0                     | 32   | 32   | 69,5%  |
| 1    | 3 | 8  | 2 | 1 | 1 | Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG | Jumlah Pertimbangan Teknis perencanaan Bangunan yang dikeluarkan (dokumen)                    | 45  | 0  | 3   | 228   | 760%                  | 500  | 728  | 1617,7%                                      |
| 1    | 3 | 8  | 2 | 1 | 2 | Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota  | Jumlah Infrastruktur yang dibangun/ditingkatkan (unit)  | 46  | 2  | 7   | 0   | 0%                    | 2  | 2  | 4,3%   |
|      |   |    |   |   |   |  |   |   |  |   |   |                       |  |  |  |
| 1    | 3 | 11 |   |   |   | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI   | Persentase Lembaga Konstruksi yang terbina  | 100   | 100  | 0   | 0   | 0                     | 100  | 100  | 100  |
| %    | % | 11 | 2 | 1 |   | Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi   | Jumlah sertifikat keahlian yang diterbitkan   | 416   | 19   | 65  | 0   | 0%                    | 65   | 65   | 15,6%  |
| 1    | 3 | 11 | 2 | 1 | 4 | Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi   | Jumlah peserta Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi (orang)                                   | 260   | 19   | 0   | 0   | 0%                    | 60   | 60   | 23%  |
| 1    | 3 | 11 | 2 | 1 | 6 | Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi  | Jumlah sertifikat keahlian yang diterbitkan (sertifikat)                                      | 156   | 0  | 90  | 0   | 0%                    | 65   | 65   | 41,6%  |

| Kode |   |    |   |   |   | Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan                                      | Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)   | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n - 3) /2022 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun n - 2) / 2023 |   |                       | Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun n - 1) / 2024 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan |  |
|------|---|----|---|---|---|--|---|---|--|---|---|-----------------------|--|--|--|
|      |   |    |   |   |   |  |   |   |  | Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) / 2023                                  | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) / 2023 | Tingkat realisasi (%) |  | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) / 2024   | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1    |   |    |   |   |   | 2  | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8=(7/6)               | 9  | 10=(7+9)   | 11=(10/4)                                    |
| 1    | 3 | 11 | 2 | 1 | 7 | Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi   | Jumlah lembaga konstruksi yang terbina (Lembaga Konstruksi)   | 40  | 20   | 60  | 0   | 0%                    | 30   | 30   | 75%  |
| 1    | 3 | 11 | 2 | 4 |   | Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi               | Persentase Monitoring dan evaluasi kegiatan Jasa Konstruksi   | 100   | 100  | 70  | 0   | 0%                    | 100  | 100  | 100%   |
| 1    | 3 | 11 | 2 | 4 | 3 | Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi | Persentase termonevnya tertib Usaha, tertib Penyelenggaraan, dan tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi (%) | 60  | 60   | 100   | 0   | 0%                    | 100 %  | 100  | 166,6%                                       |
| 1    | 3 | 12 |   |   |   | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG   | Persentase ketaatan terhadap RTRW   | 90  | 70   | 75  | 0   | 0%                    | 80 %   | 80   | 88,8%  |
| 1    | 3 | 12 | 2 | 1 |   | Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota       | Jumlah ditetapkan Peraturannya Peraturan Daerah RTRW dan Peraturan Daerah RDTR Kawasan                  | 6   | 0  | 1   | 0   | 0%                    | 1  | 1  | 16,6 %                                       |
| 1    | 3 | 12 | 2 | 1 | 1 | Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota   | Jumlah koordinasi dalam rangka penetapan rencana tata ruang (kali)                                      | 0   | 0  | 1   | 0   | 0%                    | 0%   | 0  | 0  |
| 1    | 3 | 12 | 2 | 1 | 3 | Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang  | Jumlah kebijakan penataan ruang yang ditetapkan (peraturan)   | 6   | 0  | 1   | 1   | 100%                  | 0%   | 1  | 16,6%  |
| 1    | 3 | 12 | 2 | 1 | 4 | Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundangundangan Bidang Penataan Ruang                          | Jumlah peserta sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Penataan Ruang (orang)                  | 5   | 0  | 0   | 0   | 0%                    | 0%   | 1  | 20%  |
| 1    | 3 | 12 | 2 | 2 |   | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota                             | Jumlah Perencanaan tata ruang yang telah ada (Dokumen)  | 14  | 100  | 4   | 0   | 0                     | 5  | 5  | 35,7%  |
| 1    | 3 | 12 | 2 | 2 | 2 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota   | Jumlah dokumen penyusunan RRTR Kabupaten (dokumen)  | 14  | 1  | 4   | 0   | 0%                    | 1  | 5  | 35,7%  |
| 1    | 3 | 12 | 2 | 3 |   | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota                                  | Jumlah pemanfaatan tata ruang yang telah sesuai (lokasi)  | 135   | 18   | 24  | 0   | 0%                    | 2  | 2  | 1,4%   |
| 1    | 3 | 12 | 2 | 3 | 1 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah                 | Jumlah Rekomendasi Investasi yang diterbitkan   | 56  | 5  | 24  | 0   | 0%                    | 2  | 2  | 3,5%   |

| Kode |    |    |   |   |   | Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan                              | Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)                                   | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n - 3) /2022 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun n - 2) / 2023 |   |                       | Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun n - 1) / 2024 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan |  |
|------|----|----|---|---|---|--|---|---|--|---|---|-----------------------|--|--|--|
|      |    |    |   |   |   |  |   |   |  | Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) / 2023                                  | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) / 2023 | Tingkat realisasi (%) |  | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) / 2024   | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1    |    |    |   |   |   | 2  | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8=(7/6)               | 9  | 10=(7+9)   | 11=(10/4)                                    |
|      |    |    |   |   |   |  | (rekomendasi)   |   |  |   |   |                       |  |  |  |
| 1    | 3  | 12 | 2 | 4 |   | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota             | Jumlah pemanfaatan ruang yang dapat dikendalikan (lokasi)                                 | 45  | 2  | 2   | 0   | 0%                    |  |  |  |
| 1    | 3  | 12 | 2 | 4 | 4 | Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang  | Jumlah pengendalian ruang yang terlaksana (kali)  | 32  | 2  | 1   | 0   | 0%                    |  |  |  |
| 2    | 10 | 4  |   |   |   | PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN  | Persentase Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Tanah Gaapan (%)                              | 100   | 100  | 100   | 0   | 0%                    | 0  | 0  | 0  |
| 2    | 10 | 4  | 2 | 1 |   | Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota                              | Jumlah penyelesaian sengketa tanah garapan di Kabupaten Lima Puluh Kota yang difasilitasi | 23  | 0  | 1   | 0   | 0%                    | 0  | 0  | 0  |
| 2    | 10 | 4  | 2 | 1 | 1 | Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah sengketa, konflik, dan perkara pertanahan yang difasilitasi (kasus)                | 19  | 0  | 1   | 0   | 0%                    | 0  | 0  | 0  |
| 2    | 10 | 9  |   |   |   | PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH   | Persentase izin pengelolaan membuka tanah yang difasilitasi (%)                           | 80  | 0  | 40  | 0   | 0%                    | 0  | 0  | 0  |
| 2    | 10 | 9  | 2 | 1 |   | Penerbitan Izin Membuka Tanah  | Luas izin membuka tanah   | 44  | 0  | 20  | 0   | 0%                    | 0  | 0  | 0  |
| 2    | 10 | 9  | 2 | 1 | 2 | Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara  | Jumlah pengendalian pemanfaatan tanah negara yang terlaksana yang difasilitasi (kali)     | 80  | 11   | 0   | 0   | 0%                    | 0  | 0  | 0  |
| 2    | 10 | 10 |   |   |   | PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH   | Persentase penatagunaan tanah di Kabupaten Lima Puluh Kota                                | 100   | 0  | 20  | 0   | 0%                    | 0  | 0  | 0  |
| 2    | 10 | 10 | 2 | 1 |   | Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota                           | Jumlah penggunaan tanah yang difasilitasi   | 8   | 2  | 0   | 0   | 0%                    | 0  | 0  | 0  |
| 2    | 10 | 10 | 2 | 1 | 1 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah                                     | Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemberian perencanaan penggunaan tanah (kali)          | 5   | 21   | 0   | 0   | 00%                   | 2  | 0  | 0  |

Dari hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2023, dapat disimpulkan Bahwa Semua Program/Kegiatan/sub Kegiatan dapat memenuhi semua target kinerja.

**Tabel 2.2**  
**Realisasi program/ kegiatan/ sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan**

| No. | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  | Penyebab Telah terpenuhinya target kinerja |
|-----|--|--|
| 1   | 2  | 3  |
| A.  | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>   |  |
| 1.  | <b>Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>  | Kegiatan dapat terlaksana sesuai Renja     |
| a.  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | Kegiatan dapat terlaksana sesuai Renja     |
| b.  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD  | Kegiatan dapat terlaksana sesuai Renja     |
| 2.  | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>  | Kegiatan dapat terlaksana sesuai Renja     |
| a.  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  | Kegiatan dapat terlaksana sesuai Renja     |
| 3.  | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>  | Kegiatan dapat terlaksana sesuai Renja     |
| a.  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor   | Kegiatan dapat terlaksana sesuai Renja     |
| b.  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor   | Kegiatan dapat terlaksana sesuai Renja     |
| c.  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  | Kegiatan dapat terlaksana sesuai Renja     |
| d.  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan   | Kegiatan dapat terlaksana sesuai Renja     |
| e.  | Fasilitasi Kunjungan Tamu  | Kegiatan dapat terlaksana sesuai Renja     |
| f.  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | Kegiatan dapat terlaksana sesuai Renja     |
| 4.  | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | Kegiatan dapat terlaksana sesuai Renja     |
| a.  | Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik  | Kegiatan dapat terlaksana sesuai Renja     |
| b.  | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | Kegiatan dapat terlaksana sesuai Renja     |
| c.  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Kegiatan dapat terlaksana sesuai Renja     |
| 5.  | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   | Kegiatan dapat terlaksana sesuai Renja     |
| a.  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak. dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan   | Kegiatan dapat terlaksana sesuai Renja     |
| b.  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar  | Kegiatan dapat terlaksana sesuai Renja     |
| c.  | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Kegiatan dapat terlaksana sesuai Renja     |
| B.  | <b>PROGR AM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>  | Kegiatan dapat terlaksana sesuai Renja     |
| 1.  | <b>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten n/Kota</b>  | Kegiatan dapat terlaksana sesuai Renja     |
| a.  | Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya   | Kegiatan dapat terlaksana sesuai Renja     |
| b.  | Normalisasi/ Restorasi Sungai  | Kegiatan dapat terlaksana sesuai Renja     |
| 2.  | <b>Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b> | Kegiatan dapat terlaksana sesuai Renja     |
| a.  | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa   | Kegiatan dapat terlaksana sesuai Renja     |
| b.  | Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan   | Kegiatan dapat terlaksana sesuai Renja     |
| c.  | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan  | Kegiatan dapat terlaksana sesuai Renja     |
| d.  | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan  | Kegiatan dapat terlaksana sesuai Renja     |
| C.  | <b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>  | Kegiatan dapat terlaksana sesuai Renja     |
| 1.  | <b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</b>  | Kegiatan dapat terlaksana sesuai Renja     |
| a.  | Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan   | Kegiatan dapat terlaksana sesuai Renja     |
| b.  | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan   | Kegiatan dapat terlaksana sesuai Renja     |
| D   | <b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>  | Kegiatan dapat terlaksana sesuai Renja     |
| 1.  | <b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>   | Kegiatan dapat terlaksana sesuai Renja     |
| a.  | Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik   | Kegiatan dapat terlaksana sesuai Renja     |

Tabel 2.3  
Realisasi program/ kegiatan/ sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

| No | Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan   | Penyebab Melebihi Target Kinerja                 |
|----|---|--|
| 1  | 2   | 3  |
| 1  | Sub Kegiatan Normalisasi/Restorasi Sungai   | Ada tambahan paket kegiatan di APBD Perubahan    |
| 2  | Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa | Ada tambahan paket perencanaan di APBD Perubahan |
| 3  | Sub Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan   | Ada tambahan paket kegiatan di APBD Perubahan    |
| 4  | Sub Kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan                                 | Ada tambahan paket kegiatan di APBD Perubahan    |

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat dilihat pada Tabel 2.4 dan 2.5.

Tabel 2.4  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota

| No | Indikator  | SPM / standar nasional I (%) | IKK   | Target Renstra Perangkat Daerah |            |            |            | Realisasi Capaian |            | Proyeksi   |            | Catatan Analisis   |
|----|--|------------------------------|-------|---------------------------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|--|
|    |  |                              |       | Tahun 2022                      | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Tahun 2022        | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 |  |
| 1  | Persentase Bangunan Gedung yang layak (%)  |                              |       | 71                              | 75         | 77         | 80         | 71                | 71         | 77         | 80         | Target Renstra telah disesuaikan dengan kondisi dan ketersediaan anggaran  |
| 2  | Persentase Bangunan dan Lingkungan yang telah ditata (%)   |                              |       | 55                              | 60         | 65         | 70         | 55                | 55         | 55         | 70         | Target Renstra telah disesuaikan dengan kondisi dan ketersediaan anggaran  |
| 3  | Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap  |                              | 61,43 | 57,05                           | 58,65      | 59,95      | 61,43      |                   | 59,57      | 59,95      | 61,43      | Proyeksi Capaian telah disesuaikan dengan kondisi dan ketersediaan anggaran  |
| 4  | Persentase Saluran Drainase dalam kondisi baik (%)   |                              |       | 44                              | 46         | 48         | 50         | 44                | 46         | 48         | 50         | Target Renstra telah disesuaikan dengan kondisi dan ketersediaan anggaran  |
| 5  | Persentase Lembaga Konstruksi yang terbina (%)   |                              |       | 100                             | 100        | 100        | 100        | 100               | 100        | 100        | 100        | Target Renstra telah disesuaikan dengan kondisi dan ketersediaan anggaran  |
| 6  | Persentase rumah tangga yang memperoleh akses air minum  | 100                          | 88,22 | 83,12                           | 84,72      | 86,42      | 88,22      |                   | 81,7       | 86,42      | 88,22      | Proyeksi Capaian telah disesuaikan dengan kondisi dan ketersediaan anggaran, namun masih jauh dibawah target SPM secara nasional |
| 7  | Persentase rumah tangga yang memperoleh akses sanitasi yang layak  | 100                          | 85,05 | 80,05                           | 81,65      | 83,35      | 85,05      |                   | 66,47      | 83,35      | 85,05      | Proyeksi Capaian telah disesuaikan dengan kondisi dan ketersediaan anggaran, namun masih jauh dibawah target SPM secara nasional |
| 8  | Persentase pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan (%)   |                              |       | 5                               | 20         | 30         | 40         | 0                 | 0          | 0          | 0          | Target Renstra telah disesuaikan dengan kondisi dan ketersediaan anggaran  |
| 9  | Persentase Kawasan Permukiman yang telah dikembangkan (%)  |                              |       | 10                              | 20         | 30         | 40         | 0                 | 0          | 0          | 0          | Target Renstra telah disesuaikan dengan kondisi dan ketersediaan anggaran  |
| 10 | Persentase luas daerah irigasi dalam kondisi baik  |                              | 8,72  | 78,32                           | 79,12      | 79,92      | 80,72      |                   | 88,09      | 79,92      | 80,72      | Proyeksi Capaian disesuaikan dengan kondisi dan ketersediaan anggaran  |
| 5  | Persentase ketaatan terhadap RTRW  |                              | 85    | 70                              | 75         | 80         | 85         | 70                |            | 80         | 85         | Target Renstra telah disesuaikan dengan kondisi dan ketersediaan anggaran  |
| 12 | Persentase cakupan pengelolaan Izin Lokasi (%)   |                              |       | 2                               | 2          | 3          | 3          | 2                 | 2          | 3          | 3          | Target Renstra telah disesuaikan dengan kondisi dan ketersediaan anggaran  |
| 13 | Persentase Fasilitasi Pengadaan Tanah (%)  |                              |       | 2                               | 2          | 2          | 2          | 2                 | 2          | 2          | 2          | Target Renstra telah disesuaikan dengan kondisi dan ketersediaan anggaran  |
| 14 | Persentase fasilitasi penyelesaian sengketa tanah garapan (%)  |                              |       | 100                             | 100        | 100        | 100        | 100               | 100        | 100        | 100        | Target Renstra telah disesuaikan dengan kondisi dan ketersediaan anggaran  |
| 15 | Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan (%)                          |                              |       | 30                              | 25         | 25         | 20         | 0                 | 0          | 25         | 20         | Target Renstra telah disesuaikan dengan kondisi dan ketersediaan anggaran  |
| 16 | Persentase Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee yang telah |                              |       | 20                              | 20         | 20         | 20         | 20                | 20         | 20         | 20         | Target Renstra telah disesuaikan dengan kondisi dan ketersediaan anggaran  |



| No | Indikator  | SPM / standar nasional I (%) | IKK | Target Renstra Perangkat Daerah |            |            |            | Realisasi Capaian |            | Proyeksi   |            | Catatan Analisis  |
|----|--|------------------------------|-----|---------------------------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|---|
|    |  |                              |     | Tahun 2022                      | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Tahun 2022        | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 |   |
|    | diselesaikan (%)   |                              |     |                                 |            |            |            |                   |            |            |            |   |
| 17 | Persentase fasilitas penetapan Tanah Ulayat (%)                |                              |     | 20                              | 20         | 20         | 20         | 20                | 20         | 20         | 20         | Target Renstra telah disesuaikan dengan kondisi dan ketersediaan anggaran |
| 18 | Persentase Tanah Kosong yang telah dikelola (%)                |                              |     | 20                              | 20         | 20         | 20         | 0                 | 0          | 20         | 20         | Target Renstra telah disesuaikan dengan kondisi dan ketersediaan anggaran |
| 19 | Persentase izin membuka tanah yang difasilitasi (%)            |                              |     | 40                              | 50         | 60         | 70         | 50                | 50         | 60         | 70         | Target Renstra telah disesuaikan dengan kondisi dan ketersediaan anggaran |
| 20 | Persentase penatagunaan tanah di Kabupaten Lima Puluh Kota (%) |                              |     | 20                              | 20         | 20         | 0          | 0                 | 0          | 20         | 0          | Target Renstra telah disesuaikan dengan kondisi dan ketersediaan anggaran |
| 21 | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah                |                              |     | 78,5                            | 78,92      | 79,45      | 79,85      |                   |            | 79,45      | 79,85      | Target Renstra telah disesuaikan dengan kondisi dan ketersediaan anggaran |
| 22 | Indeks Reformasi Birokrasi                                     |                              |     | 26,14                           | 28,24      | 30,34      | 32,44      |                   |            | 30,34      | 32,44      | Target Renstra telah disesuaikan dengan kondisi dan ketersediaan anggaran |
| 23 | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat                               |                              |     | 0,762                           | 0,782      | 0,802      | 0,822      |                   |            | 0,802      | 0,822      | Target Renstra telah disesuaikan dengan kondisi dan ketersediaan anggaran |

Tabel 2.5  
Pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

| No. | Tujuan / Sasaran  | Indikator   | SPM / Standar Nasional | IKK | Target Renstra Perangkat Daerah |        | Realisasi Pencapaian |       | Catatan Analisis  |
|-----|---|---|------------------------|-----|---------------------------------|--------|----------------------|-------|---|
|     |   |   |                        |     | 2023                            | 2024   | 2023                 | 2024  |   |
| 1   | Meningkatnya pemenuhan kebutuhan bangunan strategis   | Persentase gedung strategis yang terbangun  |                        |     | 84,78                           | 89,13  | 71,47%               | 76,09 | Capaian tahun sampai tahun 2023 masih dibawah target Renstra, perlu prioritas anggaran di tahun akan datang untuk mencapainya                 |
| 2   | Meningkatnya kualitas jalan   | Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten  |                        |     | 58,65%                          | 59,95  | 59,57%               | 60    | Capaian tahun sampai tahun 2023 masih dibawah target Renstra, perlu prioritas anggaran di tahun akan datang untuk mencapainya                 |
| 3   | Meningkatkan layanan akses air minum dan sanitasi masyarakat                                | Persentase Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten | 100                    |     | 84,72%                          | 86,42  | 81,7%                | 82    | Capaian tahun sampai tahun 2023 sudah diatas target Renstra, perlu prioritas anggaran di tahun akan datang untuk mempertahankan pencapaiannya |
|     |   | Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic   | 100                    |     | 81,35%                          | 83,35% | 66,47%               | 67    |   |
| 4   | Tercukupinya persediaan air irigasi untuk pertanian rakyat terhadap sistem irigasi yang ada | Rasio luas daerah irigasi kewangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi  |                        |     | 79,12%                          | 79,92  | 88,09%               | 88%   | Capaian tahun sampai tahun 2023 masih dibawah target Renstra, perlu prioritas anggaran di tahun akan datang untuk mencapainya                 |
| 5   | Meningkatnya Penataan Ruang Kawasan yang sesuai RTRW  | Persentase ketaatan terhadap RTRW   |                        |     | 75%                             | 80     | 75                   | 80    | Capaian tahun sampai tahun 2023 masih dibawah target Renstra, perlu prioritas anggaran di tahun akan datang untuk mencapainya                 |

### 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan, kajian hasil evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, maka dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat

Daerah berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra SKPD.

Isu-isu penting dalam penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dimaksud sebagai berikut :

1. Tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah sudah baik namun karena keterbatasan anggaran maka masih banyak kebutuhan dan usulan masyarakat yang belum terpenuhi.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang :
  - Harga Penawaran dari Penyedia Konstruksi untuk pekerjaan yang dilelang sangat rendah, sehingga bisa berdampak pada kualitas pekerjaan konstruksi.
  - Keterbatasan anggaran untuk pengawasan dan monitoring kegiatan ke lapangan.
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*);
  - Terlaksananya Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan baik, akan mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah.
  - Terlaksananya Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan baik juga ikut menyukseskan tercapainya program nasional di bidang infrastruktur.
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diantaranya :

  - Keterbatasan jumlah personil
  - Keterbatasan APBD dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap infrastruktur yang baik.

Peluang dalam meningkatkan pelayanan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diantaranya :

  - Masyarakat mempunyai harapan yang besar pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan siap mendukung program yang dilaksanakan.
  - Tersedia peluang meraih dana dari pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk peningkatan infrastruktur di Kabupaten Lima Puluh Kota
5. Rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.
  - a. Adanya prioritas usulan kegiatan yang sangat dibutuhkan masyarakat
  - b. Adanya prioritas kegiatan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah serta program nasional

## **2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Salah satu tujuan dilakukannya review terhadap Rancangan Awal RKPD adalah untuk menghindari inkonsistensi substansi Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan berbagai rumusan yang sudah tertuang dalam Rancangan Awal RKPD, karena pada hakikatnya Renja tersebut disusun adalah untuk mendukung pencapaian target prioritas pembangunan serta target program dan kegiatan yang sudah dirumuskan dalam Rancangan Awal RKPD. Pada akhirnya, Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang juga akan mengalami penyempurnaan setelah Rancangan RKPD tersebut sudah ditetapkan menjadi RKPD dengan Peraturan Bupati.

Riview Rancangan Awal RKPD dilakukan dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.

Dari hasil Riview Rancangan Awal RKPD diperoleh temuan-temuan dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD sebagai berikut :

1. Adanya Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 yang mengakibatkan berubahnya indikator dan sub kegiatan pada rancangan awal renja Dinas PUPR
2. Belum terpetakannya Indikator dan Sub Kegiatan pada kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota.

Riview terhadap rancangan awal RKPD disajikan dalam Tabel 2.6 sebagai berikut :

**Tabel 2.6**  
**Riview terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025**  
**Kabupaten Lima Puluh Kota**

| No | Rancangan Awal RKPD   |   |  |                |                      | Hasil Analisis Kebutuhan  |  |  |                 |                      | Catatan Penting  |
|----|---|---|--|----------------|----------------------|---|--|--|-----------------|----------------------|--|
|    | Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja   | Lokasi   | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) | Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja  | Lokasi   | Target Capaian  | Pagu Indikatif (Rp.) |  |
| 1  | 2   | 3   | 4  | 5              | 6                    | 7   | 8  | 9  | 10              | 11                   | 12   |
|    | PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG   |   |  |                | 75.432.622.202       | PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG   |  |  |                 | 70.282.341.302       | 1. Adanya Keppmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keppmendagri Nomor 050-5889 yang mengakibatkan berubahnya indikator dan sub kegiatan pada rancangan awal renja Dinas PUPR<br>2. Adanya rasionalisasi pagu sebagai tindak lanjut diterbitkannya PMK No.212/PMK.07/2022<br>3. Belum terpetakannya Indikator dan Sub Kegiatan pada kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota |
| A  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           | Persentase Pelaksanaan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)  |  | 100%           | 10.118.990.802       | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           | Persentase Pelaksanaan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   |  | 100%            | 10.132.622.202       |  |
| I  | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Persentase Pelaksanaan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)  |  | 100%           | 105.000.000          | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Persentase sinergitas perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah  |  | 100%            | 50.000.000,00        |  |
| 1  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah dokumen Renstra dan Renja yang disusun (dokumen)                       | Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang | 2              | 35.000.000           | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang | 2 Dokumen       | 20.000.000,00        |  |
| 2  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah laporan triwulan pengendalian dan evaluasi yang disusun (dokumen)      | Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang | 4              | 35.000.000           | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang | 1 Laporan       | 20.000.000,00        |  |
| 3  | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah dokumen LKJIP, LKPJ yang disusun (dokumen)                             | Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang | 2              | 35.000.000           | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang | 1 Laporan       | 10.000.000,00        |  |
| II | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | Persentase penyediaan gaji dan tunjangan ASN serta penyusunan laporan OPD (%) |  | 100%           | 6.081.990.802        | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | Persentase penyediaan gaji dan tunjangan ASN serta penyusunan laporan OPD  |  | 100%            | 8.037.622.202        |  |
| 4  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangan (orang)                        | Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang | 85             | 6.071.990.802        | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang | 102 Orang/bulan | 8.032.622.202        |  |

| No  | Rancangan Awal RKPD   |  |  |                |                      | Hasil Analisis Kebutuhan  |  |  |                |                      | Catatan Penting |
|-----|---|--|--|----------------|----------------------|---|--|--|----------------|----------------------|-----------------|
|     | Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja  | Lokasi   | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) | Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja  | Lokasi   | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) |                 |
| 5   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD       | Jumlah dokumen laporan akhir tahun yang disusun (dokumen)            | Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang | 1              | 10.000.000           | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD       | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang | 1 Laporan      | 5.000.000            |                 |
| III | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah            | Persentase terdatanya seluruh barang milik daerah (%)                |  | 100%           | 46.000.000           | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah            | Persentase terdatanya seluruh barang milik daerah  |  | 100%           |                      |                 |
| 6   | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD         | Jumlah dokumen RKBK yang disusun (dokumen)                           | Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang | 1              | 20.000.000           | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD         | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD  | Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang | 1 Dokumen      |                      |                 |
| 7   | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Inventaris Barang akhir tahun yang disusun (dokumen)  | Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang | 1              | 26.000.000           | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                                   | Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang | 1 Laporan      |                      |                 |
| IV  | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                         | Persentase pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%) |  | 100%           | 200.000.000          | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                         | Persentase pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah   |  | 100%           | 80.000.000           |                 |
|     |   |  |  |                |                      | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya            | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan   |  | 1 Paket        | 80.000.000           |                 |
| V   | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                | Persentase pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)        |  | 100%           | 427.000.000          | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                | Persentase pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah  |  | 100%           | 239.000.000          |                 |
| 8   | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah komponen instalasi listrik yang diadakan (jenis)              | Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang | 26             | 15.000.000           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                 | Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang | 4 Paket        | 10.000.000,00        |                 |
| 9   | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                      | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia (unit)        | Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang | 38             | 100.000.000          | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                      | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan   | Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang | 4 Paket        | 42.000.000           |                 |
| 10  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                  | Jumlah alat tulis kantor yang tersedia (jenis)                       | Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang | 66             | 80.000.000           | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan   | Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang | 5 Paket        | 42.000.000           |                 |

| No  | Rancangan Awal RKPD   |   |  |                |                      | Hasil Analisis Kebutuhan  |   |  |                |                      | Catatan Penting |
|-----|---|---|--|----------------|----------------------|---|---|--|----------------|----------------------|-----------------|
|     | Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja   | Lokasi   | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) | Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja   | Lokasi   | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) |                 |
| 11  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 | Jumlah barang cetak yang tersedia (lembar)  | Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang | 7300           | 50.000.000           | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                             | Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang | 2 Paket        | 25.000.000           |                 |
| 12  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                | Jumlah bahan bacaan yang tersedia (jenis)   | Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang | 4              | 12.000.000,00        | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan          | Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang | 4 Dokumen      | 12.000.000           |                 |
| 13  | Fasilitasi Kunjungan Tamu   | Jumlah makanan dan minuman tamu yang disediakan (porsi)                                   | Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang | 5900           | 60.000.000           | Fasilitasi Kunjungan Tamu   | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu  | Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang | 1 Laporan      | 40.000.000           |                 |
| 14  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | Jumlah OH yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi (OH)                             | Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang | 46             | 110.000.000          | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang | 1 Laporan      | 100.000.000          |                 |
| V I | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | <b>Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)</b> |  | <b>78%</b>     | <b>1.050.000.000</b> | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | <b>Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> |  | <b>78%</b>     | <b>1.080.000.000</b> |                 |
| 15  | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                     | Jumlah Kendaraan Dinas yang tersedia (unit)   | Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang | 2              | 100.000.000,00       | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                     | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                 | Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang | 0 Unit         | 0                    |                 |
| 16  | Pengadaan Alat Besar  | Jumlah Alat Besar yang tersedia (unit)  | Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang | 0              | 1.800.000.000        | Pengadaan Alat Besar  | Jumlah Alat Besar yang tersedia (unit)  | Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang | 1 Unit         | 1.080.000.000        |                 |
| 17  | Pengadaan Mebel   | Jumlah mebel yang tersedia (unit)   | Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang | 25             | 2.100.000.000        | Pengadaan Mebel   | Jumlah mebel yang tersedia (unit)   | Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang | 0 Unit         | 0                    |                 |
| VII | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>             | <b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)</b>                |  | <b>100%</b>    | <b>155.000.000</b>   | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>             | <b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                |  | <b>100%</b>    | <b>106.000.000</b>   |                 |
| 18  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | Jumlah materai yang tersedia (lembar)   | Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang | 1270           | 5.000.000            | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang | 1 Laporan      | 1.000.000            |                 |

| No   | Rancangan Awal RKPD  |  |  |                |                      | Hasil Analisis Kebutuhan   |  |  |                |                      | Catatan Penting |
|------|--|--|--|----------------|----------------------|--|--|--|----------------|----------------------|-----------------|
|      | Program/Kegiatan   | Indikator Kinerja  | Lokasi   | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) | Program/Kegiatan   | Indikator Kinerja  | Lokasi   | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) |                 |
| 19   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Jumlah rekening telpon dan listrik yang dibayarkan (rekening)                        | Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang | 48             | 100.000.000          | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang | 1 Laporan      | 75.000.000           |                 |
| 20   | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | Jumlah peralatan kantor yang dipelihara (unit)                                       | Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang | 50             | 30.000.000           | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                       | Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang | 1 Laporan      | 15.000.000           |                 |
| 21   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah tanaga kontrak yang dibayarkan gajinya (orang)                                | Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang | 28             | 20.000.000           | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang | 1 Laporan      | 15.000.000           |                 |
| VIII | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%) |  | 70%            | 1.050.000.000        | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                       |  | 70%            | 540.000.000          |                 |
| 22   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan yang dibayarkan pajak dan KIR (unit)                                | Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang | 66             | 300.000.000          | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang | 30 Unit        | 100.000.000          |                 |
| 23   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar  | Jumlah alat berat yang terpelihara (unit)  | Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang | 11             | 450.000.000          | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar  | Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya  | Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang | 11 Unit        | 200.000.000          |                 |
| 24   |  |  |  |                |                      | Pemeliharaan Mebel   | Jumlah Mebel yang Dipelihara   | Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang | 50 Unit        | 20.000.000           |                 |
| 25   | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah alat - alat ukur yang terpelihara (unit)                                      | Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang | 9              | 640.000.000          | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang | 11 Unit        | 20.000.000           |                 |
| 26   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | Jumlah pekerjaan pemeliharaan gedung kantor (paket)                                  | Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang | 1              | 50.000.000           | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang | 1 Unit         | 200.000.000          |                 |
| B    | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)  | Persentase luas daerah irigasi dalam kondisi baik (%)                                |  | 79,92%         | 5.820.106.400        | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)  | Persentase luas daerah irigasi dalam kondisi baik  |  | 79,92%         | 8.900.000.000        |                 |

| No | Rancangan Awal RKPD  |  |                      |                |                      | Hasil Analisis Kebutuhan   |  |                      |                |                      | Catatan Penting |
|----|--|--|----------------------|----------------|----------------------|--|--|----------------------|----------------|----------------------|-----------------|
|    | Program/Kegiatan   | Indikator Kinerja  | Lokasi               | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) | Program/Kegiatan   | Indikator Kinerja  | Lokasi               | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) |                 |
| IX | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota   | Persentase Sumber Daya Air yang terkelola/ terpelihara (%)   |                      | 82,36%         | 431.000.000          | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota   | Persentase Sumber Daya Air yang terkelola/ terpelihara   |                      | 82,36%         | 431.000.000          |                 |
| 27 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai         | Jumlah Dokumen Perencanaan Pengendalian Banjir yang tersusun (dokumen)                                     |                      | 6              | 178.000.000          | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai                                  | Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun |                      | 6 Dokumen      | 178.000.000          |                 |
| 28 | Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya   | Jumlah embung dan penampung air lainnya yang terpelihara (embung)  |                      | 6              | 253.000.000,00       | Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya   | Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun  |                      | 12 Unit        | 253.000.000          |                 |
|    |  |  |                      |                |                      |  |  |                      |                |                      |                 |
| X  | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase jaringan irigasi yang terkelola (%)   |                      | 81,84%         | 5.389.106.400,00     | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase jaringan irigasi yang terkelola   |                      | 81,84%         | 8.469.000.000        |                 |
| 29 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa   | Jumlah dokumen perencanaan pembangunan/ pemeliharaan jaringan irigasi / rawa yang tersusun (dokumen)       |                      | 6              | 178.000.000          | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa   | Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun                              |                      | 5 Dokumen      | 459.219.100          |                 |
| 30 | Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan   | Jumlah jaringan irigasi yang ditingkatkan (jaringan irigasi)   |                      | 32             | 1.192.555.000        | Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan   | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan   |                      | 32 KM          | 1.192.555.000        |                 |
| 31 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan  | Jumlah jaringan irigasi yang terpelihara (jaringan irigasi)  |                      | 28             | 2.705.332.300,00     | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan  | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi   |                      | 28 KM          | 4.969.725.900        |                 |
| 32 | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan  | Jumlah jaringan irigasi yang terpelihara (jaringan irigasi)  |                      | 40             | 1.032.000.000        | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan  | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara  |                      | 40 KM          | 1.847.500.000        |                 |
|    |  |  |                      |                |                      |  |  |                      |                |                      |                 |
| C  | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM   | Persentase rumah tangga yang memperoleh akses air minum (%)  |                      | 86,42%         | 2.600.000.000        | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM   | Persentase rumah tangga yang memperoleh akses air minum  |                      | 86,42%         | 2.500.000.000        |                 |
| XI | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota   | Jumlah rumah tangga yang mendapatkan layanan air bersih (rumah)  |                      | 460            | 2.600.000.000        | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota   | Jumlah rumah tangga yang mendapatkan layanan air bersih  |                      | 600 rumah      | 2.500.000.000        |                 |
|    | Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan  | Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | Kab. Lima Puluh Kota | 460            | 2.600.000.000        | Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan  | Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan                             | Kab. Lima Puluh Kota | 600            | 2.500.000.000        |                 |

| No   | Rancangan Awal RKPD  |   |        |                |                      | Hasil Analisis Kebutuhan   |   |                      |                              |                      | Catatan Penting |
|------|--|---|--------|----------------|----------------------|--|---|----------------------|------------------------------|----------------------|-----------------|
|      | Program/Kegiatan   | Indikator Kinerja   | Lokasi | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) | Program/Kegiatan   | Indikator Kinerja   | Lokasi               | Target Capaian               | Pagu Indikatif (Rp.) |                 |
| E    | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH   | Persentase rumah tangga yang memperoleh akses sanitasi yang layak (%)                                       |        | 83,35%         | 14.000.000.000       | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH   | Persentase rumah tangga yang memperoleh akses sanitasi yang layak   |                      | 83,35%                       | 3.500.000.000        |                 |
| XIII | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota                            | Jumlah rumah tangga yang memperoleh akses sanitasi yang layak (rumah)                                       |        | 59386          | 14.000.000.000       | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota                            | Jumlah rumah tangga yang memperoleh akses sanitasi yang layak   |                      | 59231 rumah                  | 3.500.000.000        |                 |
| 33   | Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman                                 | Jumlah tambahan rumah tangga yang memperoleh akses sanitasi yang layak (rumah)                              |        | 155            | 4.000.000.000        | Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman                           | Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun            | Kab. Lima Puluh Kota | 22.5 M <sup>3</sup> /Hari    | 3.500.000.000        |                 |
| 34   | Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)   | Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun  |        | 1 Unit         | 10.000.000.000,00    | Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)   | Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun  |                      | 0 Unit                       | 0                    |                 |
| F    | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE   | Persentase Saluran Drainase dalam kondisi baik (%)  |        | 48%            | 1.600.000.000        | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE   | Persentase Saluran Drainase dalam kondisi baik  |                      | 48%                          | 1.700.000.000        |                 |
| XIV  | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota | Panjang saluran drainase primer yg terbangun (m)  |        | 5597           |                      | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota | Panjang saluran drainase primer yg terbangun  |                      | 6 km                         | 1.700.000.000        |                 |
| 38   | Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan  | Panjang Saluran Drainase yang terbangun (km)  |        | 6              | 1.600.000.000        | Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan  | Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun  |                      | 25 Sistem Drainase Perkotaan | 1.700.000.000        |                 |
| G    | PROGRAM PENGEMBANGAN PEMUKIMAN   | Persentase Kawasan Permukiman yang telah dikembangkan (%)   |        | 30%            | 2.123.530.000        | PROGRAM PENGEMBANGAN PEMUKIMAN   | Persentase Kawasan Permukiman yang telah dikembangkan (%)   |                      | 0                            | 0                    |                 |
| XV   | Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota                       | Jumlah Kawasan Permukiman yang telah dilengkapi infrastrukturnya  |        | 20             | 2.123.530.000        | Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota                       | Jumlah Kawasan Permukiman yang telah dilengkapi infrastrukturnya  |                      | 0                            | 0                    |                 |
| 39   | Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota       | Jumlah Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah yang dibangun dan dikembangkan (unit)   |        | 6              | 1.453.530.000        | Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota       | Jumlah Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah yang dibangun dan dikembangkan (unit)   |                      | 0                            | 0                    |                 |
| 40   | Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota       | Jumlah Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah yang dimanfaatkan dan dipelihara (unit) |        | 5              | 300.000.000          | Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota       | Jumlah Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah yang dimanfaatkan dan dipelihara (unit) |                      | 0                            | 0                    |                 |



| No    | Rancangan Awal RKPD  |  |        |                |                      | Hasil Analisis Kebutuhan   |   |        |                |                      | Catatan Penting |
|-------|--|--|--------|----------------|----------------------|--|---|--------|----------------|----------------------|-----------------|
|       | Program/Kegiatan   | Indikator Kinerja  | Lokasi | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) | Program/Kegiatan   | Indikator Kinerja   | Lokasi | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) |                 |
| 41    | Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota  | Jumlah Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah yang diawasi dan dikendalikan (unit) |        | 4              | 200.000.000          | Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota  | Jumlah Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah yang diawasi dan dikendalikan (unit)  |        | 0              | 0                    |                 |
| 42    | Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota  | Jumlah Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah yang dibina (unit)                   |        | 5              | 170.000.000          | Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota  | Jumlah Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah yang dibina (unit)  |        | 0              | 0                    |                 |
| H     | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG   | Persentase Bangunan Gedung yang layak (%)  |        | 77%            | 4.700.000.000        | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG   | Persentase Bangunan Gedung yang layak   |        | 77%            | 3.200.000.000        |                 |
| XVI   | Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung                                  | Jumlah gedung yang dibangun dan ditingkatkan (unit)  |        | 32 unit        | 4.700.000.000        | Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung                                  | Jumlah gedung yang dibangun dan ditingkatkan  |        | 32 Unit        | 3.200.000.000        |                 |
| 43    | Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG | Jumlah Pertimbangan Teknis perencanaan Bangunan yang dikeluarkan (dokumen)                               |        | 3 Dokumen      | 200.000.000          | Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG | Jumlah Pertimbangan Teknis perencanaan Bangunan yang dikeluarkan (dokumen)  |        | 250 Dokumen    | 200.000.000          |                 |
| 44    | Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota  | Jumlah Infrastruktur yang dibangun/ditingkatkan (unit)   |        | 7 unit         | 4.500.000.000,00     | Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota  | Jumlah Infrastruktur yang dibangun/ditingkatkan (unit)  |        |                | 0,00                 |                 |
| 45    |  |  |        |                |                      | Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota   | Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota                     |        | 3 Dokumen      | 3.000.000.000        |                 |
| J     | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN  | Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap  |        | 59,95%         | 35.500.000.000,00    | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN  | Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap   |        | 59,95%         | 36.649.719.100       |                 |
| XVIII | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota   | Panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap (km)  |        | 660,17 km      | 35.500.000.000,00    | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota   | Panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap  |        | 660,17 Km      | 36.649.719.100       |                 |
| 47    | Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan  | Jumlah dokumen perencanaan pembangunan/pemeliharaan jalan/jembatan yang tersusun (dokumen)               |        | 5              | 500.000.000,00       | Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan  | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun |        | 6 Dokumen      | 600.000.000          |                 |

| No  | Rancangan Awal RKPD  |  |        |                |                      | Hasil Analisis Kebutuhan   |  |        |                       |                      | Catatan Penting |
|-----|--|--|--------|----------------|----------------------|--|--|--------|-----------------------|----------------------|-----------------|
|     | Program/Kegiatan   | Indikator Kinerja  | Lokasi | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) | Program/Kegiatan   | Indikator Kinerja  | Lokasi | Target Capaian        | Pagu Indikatif (Rp.) |                 |
| 48  | Pembangunan Jalan  | Panjang jalan yang dibangun (km)   |        | 10             | 2.000.000.000        | Pembangunan Jalan  | Panjang Jalan yang Dibangun  |        | 2,5 KM                | 5.000.000.000        |                 |
| 49  | Rekonstruksi Jalan   | Panjang jalan yang direkonstruksi (km)   |        | 21             | 20.000.000.000       | Rekonstruksi Jalan   | Panjang Jalan yang Direkonstruksi  |        | 4 KM                  | 12.049.719.100       |                 |
| 50  | Pemeliharaan Berkala Jalan   | Panjang jalan yang terpelihara (km)  |        | 14             | 6.000.000.000        | Pemeliharaan Berkala Jalan   | Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala   |        | 3 KM                  | 6.000.000.000        |                 |
| 51  | Pemeliharaan Rutin Jalan   | Panjang jalan yang terpelihara (km)  |        | 17             | 5.000.000.000        | Pemeliharaan Rutin Jalan   | Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin   |        | 40 KM                 | 3.000.000.000        |                 |
|     |  |  |        |                |                      | Penggantian Jembatan   | Jumlah Jembatan yang Diganti   |        | 1 Jembatan            | 4.000.000.000        |                 |
|     |  |  |        |                |                      | Pemeliharaan Rutin Jembatan  | Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin   |        | 5 Jembatan            | 1.000.000.000        |                 |
|     |  |  |        |                |                      | Pembangunan Jembatan   | Jumlah Jembatan yang Dibangun  |        | 1 Jembatan            | 4.000.000.000        |                 |
|     |  |  |        |                |                      | Pemeliharaan Berkala Jembatan  | Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala   |        | 5 Jembatan            | 1.000.000.000        |                 |
|     |  |  |        |                |                      |  |  |        |                       |                      |                 |
|     |  |  |        |                |                      |  |  |        |                       |                      |                 |
| K   | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI   | Persentase Lembaga Konstruksi yang terbina (%)   |        | 100%           | 102.000.000,00       | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI   | Persentase Lembaga Konstruksi yang terbina   |        | 100%                  | 400.000.000,00       |                 |
| XIX | Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi                           | Jumlah sertifikat keahlian yang diterbitkan (sertifikat)                                   |        | 65             | 32.000.000,00        | Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi   | Jumlah sertifikat keahlian yang diterbitkan  |        | 63 Sertifikat         | 165.000.000,00       |                 |
| 52  | Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi                              | Jumlah sertifikat keahlian yang diterbitkan (sertifikat))                                  |        | 25             | 16.000.000           | Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis     | Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihannya          |        | 30 Orang              | 100.000.000          |                 |
| 53  | Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi                     | Jumlah lembaga konstruksi yang terbina (lembaga konstruksi)                                |        | 35             | 16.000.000           | Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis | Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Disediakan |        | 1 Lembaga             | 65.000.000           |                 |
| 54  | Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi          | Persentase Termonevnya Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi yang dilaksanakan (%) |        | 100            | 12.000.000           | Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis                                | Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih  |        | 0 Orang               | 0                    |                 |
|     |  |  |        |                |                      |  |  |        |                       |                      |                 |
| XX  | Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Informasi Jasa Konstruksi di Kabupaten Lima Puluh Kota (%)                      |        | 100%           | 18.000.000           | Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota                                     | Persentase Informasi Jasa Konstruksi di Kabupaten Lima Puluh Kota  |        | 100%                  | 18.000.000           |                 |
| 55  | Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi                      | Tersedianya Informasi Jasa Konstruksi di Kabupaten Lima Puluh Kota                         |        | 1              | 18.000.000           | Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi   | Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi   |        | 1 Perangkat Pendukung | 50.000.000           |                 |

| No    | Rancangan Awal RKPD  |  |        |                |                      | Hasil Analisis Kebutuhan   |  |        |                     |                      | Catatan Penting |
|-------|--|--|--------|----------------|----------------------|--|--|--------|---------------------|----------------------|-----------------|
|       | Program/Kegiatan   | Indikator Kinerja  | Lokasi | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) | Program/Kegiatan   | Indikator Kinerja  | Lokasi | Target Capaian      | Pagu Indikatif (Rp.) |                 |
|       |  |  |        |                |                      |  | yang Disediakan  |        |                     |                      |                 |
| 56    | Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi                                   | Tersedianya SK Bupati tentang Tim Pembina Jasa Konstruksi Kabupaten Lima Puluh Kota                            |        | 1              | 18.000.000           | Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota                           | Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan                       |        | 0 Dokumen           | 0                    |                 |
| 57    | Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha   | Tersedianya Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota              |        | 1              | 12.000.000           | Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi   | Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan   |        | 0 Layanan Informasi | 0                    |                 |
|       |  |  |        |                |                      | Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota                           | Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan                       |        | 4 Dokumen           | 25.000.000           |                 |
| XXII  | Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi             | Persentase Monitoring dan evaluasi kegiatan Jasa Konstruksi (%)  |        | 80%            | 34.000.000           | Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi         | Persentase Monitoring dan evaluasi kegiatan Jasa Konstruksi (%)  |        | 80%                 | 160.000.000          |                 |
| 58    | Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa          | Persentase termonevnya tertib Usaha, tertib Penyelenggaraan, dan tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi            |        | 60             | 12.000.000           | Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota                  | Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan       |        | 9 Paket Pekerjaan   | 66.000.000           |                 |
|       |  |  |        |                |                      | Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi  | Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk |        | 2 Lembaga           | 72.000.000           |                 |
|       |  |  |        |                |                      | Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota                            | Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha                     |        | 9 Badan Usaha       | 22.000.000           |                 |
| L     | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG   | Persentase ketaatan terhadap RTRW (%)  |        | 80%            | 1.330.000.000        | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG   | Persentase ketaatan terhadap RTRW  |        | 80%                 | 1.900.000.000        |                 |
| XXIII | Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota     | Jumlah ditetapkan Peraturan Daerah RTRW dan Peraturan Daerah RDTR Kawasan (dokumen)                            |        | 1              | 530.000.000,00       | Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota | Jumlah ditetapkan Peraturan Daerah RTRW dan Peraturan Daerah RDTR Kawasan                                      |        | 1 dokumen           | 530.000.000,00       |                 |
| 59    | Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota | Jumlah RRTR yang telah mendapatkan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi atau ditetapkan (RRTR) |        | 1              | 230.000.000,00       | Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota  | Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota  |        | 2 Dokumen           | 1.600.000.000        |                 |
|       |  |  |        |                |                      |  |  |        |                     |                      |                 |

| No       | Rancangan Awal RKPD  |   |        |                |                      | Hasil Analisis Kebutuhan   |   |        |                |                      | Catatan Penting |
|----------|--|---|--------|----------------|----------------------|--|---|--------|----------------|----------------------|-----------------|
|          | Program/Kegiatan   | Indikator Kinerja   | Lokasi | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) | Program/Kegiatan   | Indikator Kinerja   | Lokasi | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) |                 |
| XXIV     | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota                 | Jumlah perencanaan tata ruang yang telah ada (dokumen)  |        | 8              | 100.000.000,00       | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota                           | Jumlah perencanaan tata ruang yang telah ada  |        | 0 Dokumen      | 0,00                 |                 |
| 60       | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota                               | Jumlah dokumen penyusunan RRTR Kabupaten (dokumen)  |        | 2              | 100.000.000,00       | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota   | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota                           |        | 0 Dokumen      | 0,00                 |                 |
|          |  |   |        |                |                      |  |   |        |                |                      |                 |
| XXV      | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota                      | Jumlah pemanfaatan tata ruang yang telah sesuai (lokasi)  |        | 20             | 50.000.000           | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota                                | Jumlah pemanfaatan tata ruang yang telah sesuai   |        | 20 Lokasi      | 50.000.000           |                 |
|          |  |   |        |                |                      | Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang                                      | Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku                          |        | 8 Layanan      | 250.000.000          |                 |
|          |  |   |        |                |                      |  |   |        |                |                      |                 |
| XXVI     | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota         | Jumlah pemanfaatan Ruang yang dapat dikendalikan (lokasi)   |        | 2              | 50.000.000           | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota                   | Jumlah pemanfaatan Ruang yang dapat dikendalikan  |        | 0 Lokasi       | 50.000.000           |                 |
| 61       | Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang  | Jumlah pelaksanaan penataan ruang yang terlaksana (lokasi)  |        | 1              | 50.000.000           | Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang  | Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang  |        | 0 Dokumen      | 0                    |                 |
|          |  |   |        |                |                      | Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK | Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang      |        | 1 Dokumen      | 50.000.000           |                 |
|          |  |   |        |                |                      |  |   |        |                |                      |                 |
|          | <b>PERTANAHAN</b>  |   |        |                | <b>2.136.750.000</b> | <b>PERTANAHAN</b>  |   |        |                | <b>400.000.000</b>   |                 |
| <b>M</b> | <b>PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI</b>   | <b>Persentase cakupan pengelolaan Izin Lokasi (%)</b>   |        | <b>100%</b>    | <b>153.510.000</b>   | <b>PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI</b>   | <b>Persentase cakupan pengelolaan Izin Lokasi (%)</b>   |        |                | <b>0</b>             |                 |
| XXVII    | Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                               | Jumlah Izin Lokasi yang direkomendasikan  |        |                | 153.510.000          | Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota   | Jumlah Izin Lokasi yang direkomendasikan  |        |                | 0                    |                 |
| 62       | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha | Jumlah Permohonan Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha yang difasilitasi (permohonan) |        | 2              | 153.510.000          | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha           | Jumlah Permohonan Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha yang difasilitasi (permohonan) |        |                | 0                    |                 |
|          |  |   |        |                |                      |  |   |        |                |                      |                 |
| <b>N</b> | <b>PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN</b>                                       | <b>Persentase fasilitasi penyelesaian sengketa tanah garapan (%)</b>                                |        | <b>100%</b>    | <b>163.740.000</b>   | <b>PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN</b>   | <b>Persentase fasilitasi penyelesaian sengketa tanah garapan</b>                                    |        | <b>0%</b>      | <b>300.000.000</b>   |                 |
| XXVIII   | Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota                          | Jumlah penyelesaian sengketa tanah garapan di Kabupaten Lima Puluh Kota yang difasilitasi           |        | 3              | 163.740.000          | Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota                                    | Jumlah penyelesaian sengketa tanah garapan di Kabupaten Lima Puluh Kota yang difasilitasi           |        | 0 Kasus        | 300.000.000          |                 |

| No | Rancangan Awal RKPD  |   |        |                |                      | Hasil Analisis Kebutuhan   |   |        |                |                      | Catatan Penting |
|----|--|---|--------|----------------|----------------------|--|---|--------|----------------|----------------------|-----------------|
|    | Program/Kegiatan   | Indikator Kinerja   | Lokasi | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) | Program/Kegiatan   | Indikator Kinerja   | Lokasi | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) |                 |
|    |  | (kasus)   |        |                |                      |  |   |        |                |                      |                 |
| 63 | Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                   | Jumlah sengketa, konflik, dan perkara pertanahan yang difasilitasi (kasus)                        |        | 2              | 73.740.000           | Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota   | Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota  |        | 1 Dokumen      | 300.000.000          |                 |
| 64 | Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                               | Jumlah Sengketa Tanah Garapan yang difasilitasi penyelesaiannya                                   |        | 2              | 90.000.000           | Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota   | Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                              |        | 0 Berita Acara | 0                    |                 |
|    |  |   |        |                |                      |  |   |        |                |                      |                 |
| O  | PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN                                       | Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan (%)                   |        | 25%            | 253.025.000          | PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN   | Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan   |        | 25%            | 100.000.000,00       |                 |
|    | Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan yang difasilitasi |        |                | 253.025.000          | Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                             | Jumlah Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan yang difasilitasi   |        |                | 100.000.000,00       |                 |
|    |  |   |        |                |                      | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota |        | 0 Dokumen      | 0,00                 |                 |
|    |  |   |        |                |                      | Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                   | Jumlah Laporan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota                    |        | 1 Laporan      | 100.000.000          |                 |
|    |  |   |        |                | 75.432.622.202       |  |   |        |                | 70.282.341.302       |                 |

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam menyusun Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, salah satu tahapan proses yang tidak boleh diabaikan adalah menampung usulan program dan kegiatan yang berasal dari bawah atau aspirasi masyarakat. Hal ini sangat penting untuk dilaksanakan karena masyarakatlah yang akan menjadi penerima manfaat dari pogram dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Sebagai salah satu Perangkat Daerah dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupaya semaksimal mungkin untuk menampung aspirasi masyarakat dengan berbagai cara dan dalam berbagai kesempatan, termasuk salah satunya pada pelaksanaan Musrenbang, baik di tingkat nagari, kecamatan maupun di tingkat kabupaten. Dalam setiap. Musrenbang, banyak aspirasi masyarakat dalam bentuk program dan kegiatan yang diarahkan secara khusus untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Sehingga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang harus mampu memilih dan memprioritaskan usulan yang diterima dan dimasukkan dalam Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Selain melalui Musrenbang, usulan dari masyarakat juga disampaikan secara langsung ke Perangkat Daerah baik melalui surat ataupun lisan, di lain waktu disela-sela pertemuan tetap juga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menerima usulan dari masyarakat, sebagai bukti bahwa masyarakat memiliki harapan yang sangat besar kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Aspirasi masyarakat yang merupakan harapan sangat dalam tersebut akan menjadi perhatian serius Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam pelaksanaan program dan kegiatan setiap tahunnya, karena luasnya wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota sehingga tidak diketahui secara detail kondisi seluruh infrastruktur yang ada. Aspirasi masyarakat ini sekaligus juga menjadi solusi untuk menyelesaikan isu-isu penting dan penyelenggaraan tugas pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Dalam penyusunan Renja Tahun 2025 melalui aplikasi SIPD, aparatur Nagari dan Kecamatan sudah mengusulkan dan menginput usulan kegiatan tahun 2025 yang berasal dari hasil musrenbang nagari dan kecamatan. Begitupun usulan kegiatan tahun 2025 yang berasal dari pokok-pokok pikiran anggota DPRD juga sudah diinput langsung oleh aparatur di Sekretariat DPRD.

Usulan program dan kegiatan tahun 2025 yang ditujukan ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat dilihat pada Tabel 2.7.

Tabel 2.7  
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025  
Kabupaten Lima Puluh Kota

PD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

| No | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja | Lokasi | Besaran / Volume | Catatan Penting |
|----|---|-------------------|--------|------------------|-----------------|
| A  | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH                              |                   |        |                  |                 |
| 1  | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota |                   |        |                  |                 |

| No       | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja  | Lokasi   | Besaran / Volume | Catatan Penting  |
|----------|---|--|--|------------------|--|
| a        | Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman  | Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun           | Pandam Gadang Kec. Gunung Omeh                                 | 1 usulan         | Diterima jika sesuai dengan prioritas pembangunan tahun 2025 dan kewenangan Perangkat Daerah |
| <b>B</b> | <b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>   |  |  |                  |  |
| <b>1</b> | <b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>   |  |  |                  |  |
| a        | Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan   | Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun   | Tersebar di Kab. Lima Puluh                                    | 37 usulan        | Diterima jika sesuai dengan prioritas pembangunan tahun 2025 dan kewenangan Perangkat Daerah |
| <b>C</b> | <b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>   |  |  |                  |  |
| <b>1</b> | <b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</b>   |  |  |                  |  |
| a        | Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan   | Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | Tersebar di Kab. Lima Puluh                                    | 16 usulan        | Diterima jika sesuai dengan prioritas pembangunan tahun 2025 dan kewenangan Perangkat Daerah |
| <b>D</b> | <b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>  |  |  |                  |  |
| <b>1</b> | <b>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>   |  |  |                  |  |
| a        | Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya  | Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun  | Tersebar di Kab. Lima Puluh                                    | 17 usulan        | Diterima jika sesuai dengan prioritas pembangunan tahun 2025 dan kewenangan Perangkat Daerah |
| <b>2</b> | <b>Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di bawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b> |  |  |                  |  |
| a        | Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan  | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan   | Tersebar di Kab. Lima Puluh                                    | 47 usulan        | Diterima jika sesuai dengan prioritas pembangunan tahun 2025 dan kewenangan Perangkat Daerah |
| b        | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan   | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi   | Tersebar di Kab. Lima Puluh                                    | 19 usulan        | Diterima jika sesuai dengan prioritas pembangunan tahun 2025 dan kewenangan Perangkat Daerah |
| c        | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan   | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara  | Taeh Baruah Kec. Payakumbuh dan Sungai Antuan Kecamatan Mungka | 2 usulan         | Diterima jika sesuai dengan prioritas pembangunan tahun 2025 dan kewenangan Perangkat Daerah |
| <b>E</b> | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>  |  |  |                  |  |

| No | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan           | Indikator Kinerja                 | Lokasi                      | Besaran / Volume | Catatan Penting  |
|----|---|-----------------------------------|-----------------------------|------------------|--|
| 1  | <b>Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</b> |                                   |                             |                  |  |
| a  | Pembangunan Jalan                           | Panjang jalan yang dibangun       | Tersebar di Kab. Lima Puluh | 9 usulan         | Diterima jika sesuai dengan prioritas pembangunan tahun 2025 dan kewenangan Perangkat Daerah |
| b  | Rekonstruksi Jalan                          | Panjang jalan yang direkonstruksi | Tersebar di Kab. Lima Puluh | 142 usulan       | Diterima jika sesuai dengan prioritas pembangunan tahun 2025 dan kewenangan Perangkat Daerah |
| c  | Pemeliharaan Berkala Jalan                  | Panjang jalan yang terpelihara    | Tersebar di Kab. Lima Puluh | 36 usulan        | Diterima jika sesuai dengan prioritas pembangunan tahun 2025 dan kewenangan Perangkat Daerah |
| d  | Pemeliharaan Berkala Jembatan Jembatan      | Jumlah jembatan yang dipelihara   | Tersebar di Kab. Lima Puluh | 5 usulan         | Diterima jika sesuai dengan prioritas pembangunan tahun 2025 dan kewenangan Perangkat Daerah |
| e  | Penggantian Jembatan                        | Jumlah Jembatan Yang diganti      | Tersebar di Kab. Lima Puluh | 12 usulan        | Diterima jika sesuai dengan prioritas pembangunan tahun 2025 dan kewenangan Perangkat Daerah |



Berdasarkan penelaahan oleh Tim Verifikasi terhadap usulan yang diinput tersebut, disampaikan sebagai berikut:

1. Usulan yang menjadi prioritas daerah dan merupakan kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat diterima dan disesuaikan dengan pagu indikatif. Diantaranya:
  - a. Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman
  - b. Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
  - c. Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
  - d. Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya
  - e. Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
  - f. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
  - g. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
  - h. Pembangunan Jalan
  - i. Rekonstruksi Jalan
  - j. Pemeliharaan Berkala Jalan
  - k. Pemeliharaan Berkala Jembatan
  - l. Penggantian Jembatan
2. Usulan kegiatan yang pada tahun 2025 yang ditolak adalah karena adanya usulan ganda dan tidak sesuai dengan kamus usulan yang diberikan.

## BAB III

### TUJUAN DAN SASARAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

#### 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan permasalahan, prioritas dan sasaran serta rencana program pembangunan daerah. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari semua prioritas dan program pembangunan yang dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku ke pentingan.

Sesuai arahan RP JPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

RPJMN 2020-2024 telah mengarusutamakan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Target-target dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam 7 agenda pembangunan Indonesia ke depan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 prioritas pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN tersebut diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan sesuai kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan yang diorientasikan melalui pencapaian strategi pembangunan yang pro-growth, pro-job, pro-poor dan pro-environment. Oleh karena itu perencanaan pembangunan daerah yang disusun oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengacu dan menguatkan serta mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional ini.

Terkait dengan perencanaan pembangunan daerah, maka kebijakan dan prioritas perencanaan pembangunan diarahkan kepada peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah. Adapun Prioritas untuk Penyusunan RKPD Tahun 2024 didasarkan pada Permendagri Nomor 81 tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2024. Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota sampai saat ini telah mampu memenuhi target nasional tersebut, yaitu dengan menetapkan Perda No. 10 tahun 2011 tentang RPJPD tahun 2005-2025 dan Perda No. 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026. Penyusunan RKPD Tahun 2025 yang merupakan penjabaran dari RPJMD juga menjadi prioritas oleh Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2025

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diarahkan agar dapat memprioritaskan :

1. Penyelesaian penyusunan Rencana Kerja urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta urusan Pertanahan.
2. Peningkatan kemampuan aparatur dalam melaksanakan seluruh urusan pada Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang baik dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi program dan kegiatan melalui sosialisasi dan atau bimbingan teknis.
3. Melaksanakan Program dan Kegiatan yang telah direncanakan dalam Renstra dan Renja Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan prioritas pada kegiatan untuk peningkatan infrastruktur.
4. Memenuhi kebutuhan pelayanan publik sesuai dengan Indikator Kinerja Kunci Kabupaten Lima Puluh Kota dalam urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta urusan Pertanahan.

#### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Adapun Tujuan dan Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi serta sasaran target kinerja Renstra adalah :

Tabel 3.1  
Target Tujuan dan Sasaran Kinerja Renja Tahun 2025

| No | Tujuan  | Sasaran   | Indikator   | Target 2025 | Ket |
|----|---|---|---|-------------|-----|
| 1  | Meningkatkan pemenuhan kebutuhan bangunan strategis   | Meningkatnya pemenuhan kebutuhan bangunan strategis   | Persentase gedung strategis yang terbangun (%)  | 93,48       |     |
| 2  | Meningkatkan Kualitas Jalan   | Meningkatnya kualitas jalan   | Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten  | 61,43       |     |
| 3  | Meningkatkan Layanan Akses Air Minum dan Sanitasi Masyarakat                                  | Meningkatkan layanan akses air minum dan sanitasi masyarakat                                | Persentase Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten (%) | 88,22       |     |
|    |   |   | Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (%)   | 85,05       |     |
| 4  | Mengoptimalkan Persediaan Air Irigasi Untuk Pertanian Rakyat Terhadap Sistem Irigasi yang Ada | Tercukupinya persediaan air irigasi untuk pertanian rakyat terhadap sistem irigasi yang ada | Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi  | 80,72       |     |
| 5  | Meningkatkan kinerja Penataan ruang wilayah   | Meningkatnya penataan ruang kawasan yang sesuai RTRW  | Persentase ketaatan terhadap RTRW (%)   | 85          |     |

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa tujuan dan sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri dari 5 tujuan dan sasaran dengan 6 indikator, yaitu :

1. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan bangunan strategis  
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan bangunan strategis diukur dengan indikator yaitu Persentase gedung strategis yang terbangun dengan target kinerja 2025 adalah 93,48%.
2. Meningkatnya kualitas jalan  
Meningkatan kualitas jalan diukur dengan indikator yaitu Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten dengan target kinerja 2025 adalah 61,43%.
3. Meningkatnya layanan akses air minum dan sanitasi masyarakat  
Meningkatnya layanan akses air minum dan sanitasi masyarakat dengan target kinerja tahun 2025 adalah 88,22% dan Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik dengan kinerja tahun 2025 adalah 85,05%.
4. Tercukupinya persediaan air irigasi untuk pertanian rakyat terhadap sistem irigasi yang ada  
Tercukupinya persediaan air irigasi untuk pertanian rakyat terhadap sistem irigasi yang ada diukur dengan indikator Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi yang target tahun 2025 adalah 80,72.
5. Meningkatnya penataan ruang kawasan yang sesuai RTRW  
Meningkatnya penataan ruang kawasan yang sesuai RTRW diukur dengan indikator persentase ketaatan terhadap RTRW yang target kinerja tahun 2025 adalah 85%.

3.3 Program dan Kegiatan

Penetapan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2025 mengacu kepada tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum yang akan dicapai pada tahun 2025. Hal ini juga mendukung pencapaian misi ke 5 Kepala Daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 yakni **Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik**. Berdasarkan hal tersebut kemudian dirumuskan

program, kegiatan dan subkegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Program, kegiatan dan subkegiatan untuk tahun 2025 tidak terlepas dari program dan kegiatan yang ada dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2021-2026.

Terkait dengan program, kegiatan dan sub kegiatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melaksanakan 2 urusan pemerintahan daerah, yaitu :

1. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2. Urusan Pertanahan

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025 terdiri atas 11 Program, 23 Kegiatan dan 62 Sub Kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp.70.282.341.302,- yang dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.2**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**  
**Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026**

**Perangkat Daerah : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

| No | Kode |   |   |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                      | Rencana Tahun 2025 |                        |                                    |             | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 |                                    |
|----|------|---|---|------|---|--|--------------------|------------------------|------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|    |      |   |   |      |   |  | Lokasi             | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana |                 | Target Capaian Kinerja            | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) |
| 1  | 2    |   |   |      | 3   | 4  | 5                  | 6                      | 7                                  | 8           | 9               | 10                                | 11                                 |
|    |      |   |   |      | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG                               |  |                    |                        | 70.282.341.302                     |             |                 |                                   | 94.059.000.000                     |
|    | 1    |   |   |      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR       |  |                    |                        | 69.882.341.302                     |             |                 |                                   | 93.594.000.000                     |
|    | 1    | 3 |   |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG          |  |                    |                        | 69.882.341.302                     |             |                 |                                   | 93.594.000.000                     |
| 1  | 1    | 3 | 1 |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA           | Persentase Pelaksanaan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)     |                    | 100%                   | 10.132.622.202                     |             |                 | 100%                              | 10.302.000.000                     |
|    | 1    | 3 | 1 | 2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah      | Persentase sinergitas perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah                |                    | 100%                   | 50.000.000                         |             | -               | 100%                              | 120.000.000                        |
|    | 1    | 3 | 1 | 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                | Persentase penyediaan gaji dan tunjangan ASN serta penyusunan laporan OPD        |                    | 100%                   | 8.037.622.202                      |             | -               | 100%                              | 6.212.000.000                      |
|    | 1    | 3 | 1 | 2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                             | Persentase pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                 |                    | 100%                   | 80.000.000                         |             | -               | 100%                              | 0                                  |
|    | 1    | 3 | 1 | 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Persentase pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah                        |                    | 100%                   | 239.000.000                        |             | -               | 100%                              | 483.000.000                        |
|    | 1    | 3 | 1 | 2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      | Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   |                    | 80%                    | 1.080.000.000                      |             | -               | 82%                               | 2.430.000.000                      |
|    | 1    | 3 | 1 | 2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  |                    | 100%                   | 106.000.000                        |             | -               | 100%                              | 187.000.000                        |
|    | 1    | 3 | 1 | 2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                    | 72%                    | 540.000.000                        |             | -               | 75%                               | 870.000.000                        |
| 2  | 1    | 3 | 2 |      | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)                             | Persentase luas daerah irigasi dalam kondisi baik                                |                    | 80,72%                 | 8.900.000.000                      |             |                 | 81,52%                            | 6.390.000.000                      |

**Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**  
**Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025**

| No | Kode |   |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                       | Rencana Tahun 2025 |                        |                                     |             | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 |                                     |
|----|------|---|----|------|--|---|--------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
|    |      |   |    |      |  |   | Lokasi             | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana |                 | Target Capaian Kinerja            | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp) |
| 1  | 2    |   |    |      | 3  | 4   | 5                  | 6                      | 7                                   | 8           | 9               | 10                                | 11                                  |
|    | 1    | 3 | 2  | 2.01 | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota   | Persentase Sumber Daya Air yang terkelola/ terpelihara            |                    | 83,49%                 | 431.000.000                         |             | -               | 84,62%                            | 775.000.000                         |
|    | 1    | 3 | 2  | 2.02 | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase jaringan irigasi yang terkelola                        |                    | 82,46%                 | 8.469.000.000                       |             | -               | 83,08%                            | 5.615.000.000                       |
| 3  | 1    | 3 | 3  |      | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM   | Persentase rumah tangga yang memperoleh akses air minum           |                    | 88,22%                 | 2.500.000.000                       |             |                 | 90,12%                            | 2.700.000.000                       |
|    | 1    | 3 | 3  | 2.01 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota   | Jumlah rumah tangga yang mendapatkan layanan air bersih           |                    | 600 rumah              | 2.500.000.000                       |             |                 | 460 rumah                         | 2.700.000.000                       |
| 4  | 1    | 3 | 5  |      | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH   | Persentase rumah tangga yang memperoleh akses sanitasi yang layak |                    | 85,05%                 | 3.500.000.000                       |             |                 | 86,85%                            | 15.500.000.000                      |
|    | 1    | 3 | 5  | 2.01 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota  | Jumlah rumah tangga yang memperoleh akses sanitasi yang layak     |                    | 59.386 rumah           | 3.500.000.000                       |             |                 | 59.541 rumah                      | 15.500.000.000                      |
| 5  | 1    | 3 | 6  |      | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE   | Persentase Saluran Drainase dalam kondisi baik                    |                    | 50%                    | 2.700.000.000                       |             |                 | 52%                               | 1.700.000.000                       |
|    | 1    | 3 | 6  | 2.01 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota   | Panjang saluran drainase primer yg terbangun                      |                    | 6436 m                 | 2.700.000.000                       |             |                 | 7.402 m                           | 1.700.000.000                       |
| 6  | 1    | 3 | 8  |      | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG   | Persentase Bangunan Gedung yang layak                             |                    | 80%                    | 3.200.000.000                       |             |                 | 85%                               | 5.310.000.000                       |
|    | 1    | 3 | 8  | 2.01 | Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung  | Jumlah gedung yang dibangun dan ditingkatkan                      |                    | 39 Unit                | 3.200.000.000                       |             | -               | 46 unit                           | 5.310.000.000                       |
| 7  | 1    | 3 | 10 |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN  | Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap           |                    | 61,43%                 | 36.649.719.100                      |             |                 | 62,78%                            | 51.100.000.000                      |
|    | 1    | 3 | 10 | 2.01 | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota   | Panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap                      |                    | 676,47 Km              | 36.649.719.100                      |             | -               | 691,33 KM                         | 51.100.000.000                      |
| 8  | 1    | 3 | 11 |      | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI   | Persentase Lembaga Konstruksi yang terbina                        |                    | 100%                   | 400.000.000                         |             |                 | 100%                              | 112.000.000                         |

| No | Kode        |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Rencana Tahun 2025 |                        |                                     |             | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 |                                     |
|----|-------------|----|----|------|--|---|--------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
|    |             |    |    |      |  |   | Lokasi             | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana |                 | Target Capaian Kinerja            | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp) |
| 1  | 2           |    |    |      | 3  | 4   | 5                  | 6                      | 7                                   | 8           | 9               | 10                                | 11                                  |
|    | 1           | 3  | 11 | 2.01 | Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi   | Jumlah sertifikat keahlian yang diterbitkan   |                    | 63 Sertifikat          | 165.000.000                         |             | -               | 68 sertifikat                     | 35.000.000                          |
|    | 1           | 3  | 11 | 2.02 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota                                 | Persentase Informasi Jasa Konstruksi di Kabupaten Lima Puluh Kota                                 |                    | 100%                   | 75.000.000                          |             | -               | 100%                              | 35.000.000                          |
|    | 1           | 3  | 11 | 2.04 | Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi                         | Persentase Monitoring dan evaluasi kegiatan Jasa Konstruksi                                       |                    | 90%                    | 160.000.000                         |             | -               | 100%                              | 42.000.000                          |
| 9  | 1           | 3  | 12 |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG   | Persentase ketaatan terhadap RTRW   |                    | 85%                    | 1.900.000.000                       |             |                 | 90%                               | 480.000.000                         |
|    | 1           | 3  | 12 | 2.01 | Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota                 | Jumlah ditetapkan Peraturan Daerah RTRW dan Peraturan Daerah RDTR Kawasan                         |                    | 1 dokumen              | 1.600.000.000                       |             | -               | 1                                 | 360.000.000                         |
|    | 1           | 3  | 12 | 2.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota                                       | Jumlah perencanaan tata ruang yang telah ada  |                    | 11 Dokumen             | 0                                   |             | -               | 14 Dokumen                        | 0                                   |
|    | 1           | 3  | 12 | 2.03 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota  | Jumlah pemanfaatan tata ruang yang telah sesuai   |                    | 20 Lokasi              | 250.000.000                         |             | -               | 20 Lokasi                         | 60.000.000                          |
|    | 1           | 3  | 12 | 2.04 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota                               | Jumlah pemanfaatan Ruang yang dapat dikendalikan  |                    | 2 Lokasi               | 50.000.000                          |             | -               | 2 lokasi                          | 60.000.000                          |
|    | 2           |    |    |      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR  |   |                    |                        | 400.000.000                         |             |                 |                                   | 465.000.000                         |
|    | 2           | 10 |    |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN  |   |                    |                        | 400.000.000                         |             |                 |                                   | 465.000.000                         |
| 10 | 2           | 10 | 4  |      | PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN  | Persentase fasilitasi penyelesaian sengketa tanah garapan   |                    | 100%                   | 300.000.000                         |             |                 | 100%                              | 210.000.000                         |
|    | 2           | 10 | 4  | 2.01 | Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota  | Jumlah penyelesaian sengketa tanah garapan di Kabupaten Lima Puluh Kota yang difasilitasi         |                    | 3 Kasus                | 300.000.000                         |             | -               | 3                                 | 210.000.000                         |
| 11 | 2           | 10 | 5  |      | PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN                                       | Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan                       |                    | 0                      | 100.000.000                         |             |                 | -                                 | 255.000.000                         |
|    | 2           | 10 | 5  | 2.01 | Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan yang difasilitasi |                    | 2 Kasus                | 100.000.000                         |             | -               | 2 Kasus                           | 255.000.000                         |
|    | J U M L A H |    |    |      |  |   |                    |                        | 70.282.341.302                      |             |                 |                                   | 94.059.000.000                      |

## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota terutama untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2021-2026 serta mendukung prioritas pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025, maka program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurung waktu 2025 adalah sebagaimana berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Sasaran dari program ini adalah Meningkatnya kualitas dan kuantitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah. Indikator yang akan dicapai melalui program ini adalah Persentase Pelaksanaan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%).

2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Sasaran dari program ini adalah Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Air. Indikator yang akan dicapai melalui program ini adalah Persentase luas daerah irigasi dalam kondisi baik (%).

3. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Sasaran dari program ini adalah Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. Indikator yang akan dicapai melalui program ini adalah Persentase rumah tangga yang memperoleh akses air minum (%).

4. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Sasaran dari program ini adalah Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah. Indikator yang akan dicapai melalui program ini adalah Persentase rumah tangga yang memperoleh akses sanitasi yang layak (%).

5. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase

Sasaran dari program ini adalah Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase. Indikator yang akan dicapai melalui program ini adalah Persentase Saluran Drainase dalam kondisi baik (%).

6. Program Penataan Bangunan Gedung

Sasaran dari program ini adalah Meningkatnya Penataan Bangunan Gedung. Indikator yang akan dicapai melalui program ini adalah Persentase Bangunan Gedung yang layak (%).

7. Program Penyelenggaraan Jalan

Sasaran dari program ini adalah Meningkatnya Penyelenggaraan Jalan. Indikator yang akan dicapai melalui program ini adalah Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap (%).

8. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Sasaran dari program ini adalah Meningkatnya Pengembangan Jasa Konstruksi. Indikator yang akan dicapai melalui program ini adalah Persentase Lembaga Konstruksi yang terbina (%).

9. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Sasaran dari program ini adalah Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang. Indikator yang akan dicapai melalui program ini adalah Persentase ketaatan terhadap RTRW (%).

10. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

Sasaran dari program ini adalah Meningkatnya Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan. Indikator yang akan dicapai melalui program ini adalah Persentase fasilitasi penyelesaian sengketa tanah garapan (%).

11. Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan

Sasaran dari program ini adalah Meningkatnya Penyelesaian Ganti Kerugian dan

***Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025***



Santunan Tanah untuk Pembangunan. Indikator yang akan dicapai melalui program ini adalah Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan (%).

Berdasarkan program tersebut di atas, maka kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 dan juga sudah digambarkan pada Bab III adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.1**  
**Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025**

| Program/Kegiatan/Sub Kegiatan |  |   |
|-------------------------------|--|---|
| URUSAN PEKERJAAN UMUM         |  |   |
| A                             | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  |   |
| I                             | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |   |
|                               | 1  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   |
|                               | 2  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                 |
|                               | 3  | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |
| II                            | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   |   |
|                               | 4  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   |
|                               | 5  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD   |
| III                           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  |   |
|                               | 6  | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya  |
| IV                            | Administrasi Umum Perangkat Daerah   |   |
|                               | 7  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor   |
|                               | 8  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  |
|                               | 9  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  |
|                               | 10   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   |
|                               | 11   | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan  |
|                               | 12   | Fasilitasi Kunjungan Tamu   |
|                               | 13   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  |
| V                             | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   |   |
|                               | 14   | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan   |
|                               | 15   | Pengadaan Alat Besar  |
|                               | 16   | Pengadaan Mebel   |
| VI                            | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   |   |
|                               | 17   | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |
|                               | 18   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   |
|                               | 19   | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor   |
|                               | 20   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   |
| VII                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                      |   |
|                               | 21   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan      |
|                               | 22   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar   |
|                               | 23   | Pemeliharaan Mebel  |
|                               | 24   | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |
|                               | 25   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  |
| B                             | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)  |   |
| VIII                          | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |   |
|                               | 26   | Normalisasi/Restorasi Sungai  |
|                               | 27   | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai |

| Program/Kegiatan/Sub Kegiatan |   |  |
|-------------------------------|---|--|
|                               | 28  | Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya   |
| <b>IX</b>                     | <b>Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b> |  |
|                               | 29  | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa   |
|                               | 30  | Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan   |
|                               | 31  | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan  |
|                               | 32  | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan  |
| <b>C</b>                      | <b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>   |  |
| <b>X</b>                      | <b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</b>   |  |
|                               | 33  | Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan  |
| <b>D</b>                      | <b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>   |  |
| <b>XI</b>                     | <b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>  |  |
|                               | 34  | Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman   |
|                               | 35  | Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)   |
|                               |   |  |
| <b>E</b>                      | <b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>   |  |
| <b>XII</b>                    | <b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>   |  |
|                               | 36  | Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan  |
| <b>F</b>                      | <b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>   |  |
| <b>XIII</b>                   | <b>Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</b>  |  |
|                               | 37  | Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG |
|                               | 38  | Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota   |
|                               |   |  |
| <b>G</b>                      | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>  |  |
| <b>XIV</b>                    | <b>Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</b>   |  |
|                               | 39  | Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan  |
|                               | 40  | Pembangunan Jalan  |
|                               | 41  | Rekonstruksi Jalan   |
|                               | 42  | Pemeliharaan Berkala Jalan   |
|                               | 43  | Pemeliharaan Rutin Jalan   |
|                               | 44  | Penggantian Jembatan   |
|                               | 45  | Pemeliharaan Rutin Jembatan  |
|                               | 46  | Pembangunan Jembatan   |
|                               | 47  | Pemeliharaan Berkala Jembatan  |
|                               |   |  |
| <b>H</b>                      | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>   |  |
| <b>XV</b>                     | <b>Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi</b>   |  |
|                               | 48  | Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis  |
|                               | 49  | Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi  |

| Program/Kegiatan/Sub Kegiatan |   |  |
|-------------------------------|---|--|
| XVI                           | <b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>                                 |  |
|                               | 50  | Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi   |
|                               | 51  | Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota   |
| XVII                          | <b>Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi</b>                         |  |
|                               | 52  | Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota  |
|                               | 53  | Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi  |
|                               | 54  | Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota  |
|                               |   |  |
| I                             | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>   |  |
| XVIII                         | <b>Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota</b>                 |  |
|                               | 55  | Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota  |
|                               | 56  | Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang   |
| XIX                           | <b>Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>                                       |  |
|                               | 57  | Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota   |
| XX                            | <b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>  |  |
|                               | 58  | Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang  |
| XXI                           | <b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>                               |  |
|                               | 59  | Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK   |
|                               |   |  |
| <b>URUSAN PERTANAHAN</b>      |   |  |
| J                             | <b>PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN</b>  |  |
| XXII                          | <b>Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>  |  |
|                               | 60  | Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota   |
|                               |   |  |
| K                             | <b>PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN</b>                                       |  |
| XXIII                         | <b>Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b> |  |
|                               | 61  | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota |
|                               | 62  | Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                   |

Dari tabel di atas, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota menyusun 11 Program dan 23 Kegiatan dengan 62 Sub Kegiatan untuk Tahun 2025.

Untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 didukung oleh APBD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 dengan pagu indikatif sebesar Rp.70.282.341.302,- (Tujuh Puluh Milyar Dua ratus Delapan Puluh Dua juta Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Dua Rupiah). Rincian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta pagu indikatif pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut.

**Tabel 4.2**  
**Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**  
**Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025**

| No | Kode |   |   |      |   | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode Renstra PD | Realisasi Capaian RENJA PD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |  |                                      |           |        | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab       |
|----|------|---|---|------|---|---|--|---------------------------------|---------------------------------------|---|--|---------------------|--|--------------------------------------|-----------|--------|------------------|-----------------------------------|---------------------|---|
|    |      |   |   |      |   |   |  |                                 |                                       |   | Target 2025                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi   | Sumber Dana                          | Prioritas |        |                  | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |   |
|    |      |   |   |      |   |   |  |                                 |                                       |   |  |                     |  |                                      | Nasional  | Daerah |                  |                                   |                     |   |
| 1  | 2    |   |   |      |   | 3   | 4  | 5                               | 6                                     | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                                   | 12        | 13     | 14               | 15                                | 16                  | 17                                      |
|    |      |   |   |      |   | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG   |  |                                 |                                       |   |  | 70.282.341.302      |  |                                      |           |        |                  |                                   | 94.059.000.000      |   |
|    | 1    |   |   |      |   | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                       |  |                                 |                                       |   |  | 69.882.341.302      |  |                                      |           |        |                  |                                   | 93.594.000.000      |   |
|    | 1    | 3 |   |      |   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG                          |  |                                 |                                       |   |  | 69.882.341.302      |  |                                      |           |        |                  |                                   | 93.594.000.000      |   |
| 1  | 1    | 3 | 1 |      |   | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           | -  | -                               |                                       |   | -                                      | 10.132.622.202      |  |                                      |           |        | -                | 10.302.000.000                    |                     |   |
|    | 1    | 3 | 1 | 2.01 |   | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Persentase sinergitas perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah  | -                               |                                       |   | 100%                                   | 50.000.000          |  |                                      | -         | -      | -                | -                                 | 120.000.000         |   |
|    | 1    | 3 | 1 | 2.01 | 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       |  |                                 |                                       |   |  |                     |  |                                      |           |        |                  |                                   |                     |   |
|    |      |   |   |      |   |   | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  |                                 |                                       |   | 2 Dokumen                              | 20.000.000          | Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | -      | -                |                                   | 40.000.000          | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|    | 1    | 3 | 1 | 2.01 | 6 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |  |                                 |                                       |   |  |                     |  |                                      |           |        |                  |                                   |                     |   |
|    |      |   |   |      |   |   | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                                 |                                       |   | 1 Laporan                              | 20.000.000          | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | -      | -                |                                   | 40.000.000          | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|    | 1    | 3 | 1 | 2.01 | 7 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |  |                                 |                                       |   |  |                     |  |                                      |           |        |                  |                                   |                     |   |

**Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**  
**Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025**

| N<br>o | Kode |   |   |   |    |   | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode Renstra PD | Realisasi Capaian RENJA PD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |  |                                      |           |        | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab       |
|--------|------|---|---|---|----|---|---|--|---------------------------------|---------------------------------------|---|--|---------------------|--|--------------------------------------|-----------|--------|------------------|-----------------------------------|---------------------|---|
|        |      |   |   |   |    |   |   |  |                                 |                                       |   | Target 2025                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi   | Sumber Dana                          | Prioritas |        |                  | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |   |
|        |      |   |   |   |    |   |   |  |                                 |                                       |   |  |                     |  |                                      | Nasional  | Daerah |                  |                                   |                     |   |
| 1      | 2    |   |   |   |    |   | 3   | 4  | 5                               | 6                                     | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                                   | 12        | 13     | 14               | 15                                | 16                  | 17                                      |
|        |      |   |   |   |    |   |   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |                                 |                                       |   | 1 Laporan                              | 10.000.000          | Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | -      | -                |                                   | 40.000.000          | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|        | 1    | 3 | 1 | 2 | 02 |   | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                      | Persentase penyediaan gaji dan tunjangan ASN serta penyusunan laporan OPD  | -                               |                                       |   | 1                                      | 8.037.622.202       |  |                                      | -         | -      | -                | -                                 | 6.212.000.000       |   |
|        | 1    | 3 | 1 | 2 | 02 | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                           |  |                                 |                                       |   |  |                     |  |                                      |           |        |                  |                                   |                     |   |
|        |      |   |   |   |    |   |   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  |                                 |                                       |   | 102 Orang/bulan                        | 8.032.622.202       | Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | -      | -                |                                   | 6.200.000.000       | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|        | 1    | 3 | 1 | 2 | 02 | 5 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |  |                                 |                                       |   |  |                     |  |                                      |           |        |                  |                                   |                     |   |
|        |      |   |   |   |    |   |   | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |                                 |                                       |   | 1 Laporan                              | 5.000.000           | Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | -      | -                |                                   | 12.000.000          | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|        | 1    | 3 | 1 | 2 | 05 |   | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                   | Persentase pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah   | -                               |                                       |   | 1                                      | 80.000.000          |  |                                      | -         | -      | -                | -                                 | 0                   |   |
|        | 1    | 3 | 1 | 2 | 05 | 2 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya      |  |                                 |                                       |   |  |                     |  |                                      |           |        |                  |                                   |                     |   |
|        |      |   |   |   |    |   |   | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan   |                                 |                                       |   | 1 Paket                                | 80.000.000          | Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | -      | -                |                                   | 0                   | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN                |

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025

| No | Kode |   |   |   |   |   | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode Renstra PD                           | Realisasi Capaian RENJA PD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |  |                                      |           |        | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab       |  |  |
|----|------|---|---|---|---|---|--|--|---|---------------------------------------|---|--|---------------------|--|--------------------------------------|-----------|--------|------------------|-----------------------------------|---------------------|---|--|--|
|    |      |   |   |   |   |   |  |  |   |                                       |   | Target 2025                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi   | Sumber Dana                          | Prioritas |        |                  | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |   |  |  |
|    |      |   |   |   |   |   |  |  |   |                                       |   |  |                     |  |                                      | Nasional  | Daerah |                  |                                   |                     |   |  |  |
| 1  | 2    |   |   |   |   |   | 3  | 4  | 5   | 6                                     | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                                   | 12        | 13     | 14               | 15                                | 16                  | 17                                      |  |  |
|    |      |   |   |   |   |   |  |  |   |                                       |   |  |                     | Baru Simalang ang  | UMUM                                 |           |        |                  |                                   |                     | PENATAAN RUANG                          |  |  |
|    | 1    | 3 | 1 | 2 | . | 0 | 6  | Administrasi Umum Perangkat Daerah   | Persentase pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | -                                     |   |  | 1                   | 239.000.000  |                                      |           | -      | -                | -                                 | -                   | 483.000.000                             |  |  |
|    | 1    | 3 | 1 | 2 | . | 0 | 6  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                   |   |                                       |   |  |                     |  |                                      |           |        |                  |                                   |                     |   |  |  |
|    |      |   |   |   |   |   |  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan |   |                                       |   | 4 Paket                                | 10.000.000          | Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalang ang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | -      | -                |                                   | 20.000.000          | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |  |  |
|    | 1    | 3 | 1 | 2 | . | 0 | 6  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                       |   |                                       |   |  |                     |  |                                      |           |        |                  |                                   |                     |   |  |  |
|    |      |   |   |   |   |   |  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     |   |                                       |   | 4 Paket                                | 10.000.000          | Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalang ang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | -      | -                |                                   | 110.000.000         | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |  |  |
|    | 1    | 3 | 1 | 2 | . | 0 | 6  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor   |   |                                       |   |  |                     |  |                                      |           |        |                  |                                   |                     |   |  |  |

| No | Kode |   |   |     |   | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                  | Target Akhir Periode Renstra PD | Realisasi Capaian RENJA PD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |   |                                      |           |        | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab       |  |
|----|------|---|---|-----|---|--|--|---------------------------------|---------------------------------------|---|--|---------------------|---|--------------------------------------|-----------|--------|------------------|-----------------------------------|---------------------|---|--|
|    |      |   |   |     |   |  |  |                                 |                                       |   | Target 2025                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi  | Sumber Dana                          | Prioritas |        |                  | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |   |  |
|    |      |   |   |     |   |  |  |                                 |                                       |   |  |                     |   |                                      | Nasional  | Daerah |                  |                                   |                     |   |  |
| 1  | 2    |   |   |     |   | 3  | 4  | 5                               | 6                                     | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                                   | 12        | 13     | 14               | 15                                | 16                  | 17                                      |  |
|    |      |   |   |     |   |  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                           |                                 |                                       |   | 5 Paket                                | 42.000.000          | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | -      | -                |                                   | 100.000.000         | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |  |
|    | 1    | 3 | 1 | 206 | 5 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                  |  |                                 |                                       |   |  |                     |   |                                      |           |        |                  |                                   |                     |   |  |
|    |      |   |   |     |   |  | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                  |                                 |                                       |   | 2 Paket                                | 25.000.000          | Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang  | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | -      | -                |                                   | 60.000.000          | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |  |
|    | 1    | 3 | 1 | 206 | 6 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan   |  |                                 |                                       |   |  |                     |   |                                      |           |        |                  |                                   |                     |   |  |
|    |      |   |   |     |   |  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan |                                 |                                       |   | 4 Dokumen                              | 12.000.000          | Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang  | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | -      | -                |                                   | 13.000.000          | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |  |
|    | 1    | 3 | 1 | 206 | 8 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                  |  |                                 |                                       |   |  |                     |   |                                      |           |        |                  |                                   |                     |   |  |
|    |      |   |   |     |   |  | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                     |                                 |                                       |   | 1 Laporan                              | 40.000.000          | Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru   | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | -      | -                |                                   | 60.000.000          | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN       |  |

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025

| N<br>o | Kode |   |   |                  |   | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                    | Target Akhir Periode Renstra PD | Realisasi Capaian RENJA PD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |  |  |           |        | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab      |  |
|--------|------|---|---|------------------|---|--|--|---------------------------------|---------------------------------------|---|--|---------------------|--|--|-----------|--------|------------------|-----------------------------------|---------------------|--|--|
|        |      |   |   |                  |   |  |  |                                 |                                       |   | Target 2025                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi   | Sumber Dana  | Prioritas |        |                  | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |  |  |
|        |      |   |   |                  |   |  |  |                                 |                                       |   |  |                     |  |  | Nasional  | Daerah |                  |                                   |                     |  |  |
| 1      | 2    |   |   |                  |   | 3  | 4  | 5                               | 6                                     | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11   | 12        | 13     | 14               | 15                                | 16                  | 17                                     |  |
|        |      |   |   |                  |   |  |  |                                 |                                       |   |  |                     | Simalang ang   |  |           |        |                  |                                   |                     | N RUANG                                |  |
|        | 1    | 3 | 1 | 2<br>.<br>0<br>6 | 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |  |                                 |                                       |   |  |                     |  |  |           |        |                  |                                   |                     |  |  |
|        |      |   |   |                  |   |  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD            |                                 |                                       |   | 1 Laporan                              | 100.000.000         | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa   | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                               | -         | -      | -                |                                   | 120.000.000         | DINAS PEKERJAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |  |
|        | 1    | 3 | 1 | 2<br>.<br>0<br>7 |   | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | -                               |                                       |   | 1                                      | 1.080.000.000       |  |  | -         | -      | -                | -                                 | 2.430.000.000       |  |  |
|        | 1    | 3 | 1 | 2<br>.<br>0<br>7 | 2 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan              |  |                                 |                                       |   |  |                     |  |  |           |        |                  |                                   |                     |  |  |
|        |      |   |   |                  |   |  | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan          |                                 |                                       |   | 0 Unit                                 | 0                   | Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalang ang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                               | -         | -      | -                |                                   | 120.000.000         | DINAS PEKERJAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |  |
|        | 1    | 3 | 1 | 2<br>.<br>0<br>7 | 3 | Pengadaan Alat Besar   |  |                                 |                                       |   |  |                     |  |  |           |        |                  |                                   |                     |  |  |
|        |      |   |   |                  |   |  | Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan   |                                 |                                       |   | 1 Unit                                 | 1.080.000.000       | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | -      | -                |                                   | 2.100.000.000       | DINAS PEKERJAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |  |
|        | 1    | 3 | 1 | 2<br>.<br>0<br>7 | 5 | Pengadaan Mebel  |  |                                 |                                       |   |  |                     |  |  |           |        |                  |                                   |                     |  |  |



| No | Kode |   |   |     |   | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode Renstra PD | Realisasi Capaian RENJA PD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |  |                                      |           |        | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab       |
|----|------|---|---|-----|---|--|--|---------------------------------|---------------------------------------|---|--|---------------------|--|--------------------------------------|-----------|--------|------------------|-----------------------------------|---------------------|---|
|    |      |   |   |     |   |  |  |                                 |                                       |   | Target 2025                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi   | Sumber Dana                          | Prioritas |        |                  | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |   |
|    |      |   |   |     |   |  |  |                                 |                                       |   |  |                     |  |                                      | Nasional  | Daerah |                  |                                   |                     |   |
| 1  | 2    |   |   |     |   | 3  | 4  | 5                               | 6                                     | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                                   | 12        | 13     | 14               | 15                                | 16                  | 17                                      |
|    |      |   |   |     |   |  | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan   |                                 |                                       |   | 0 Unit                                 | 0                   | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | -      | -                |                                   | 210.000.000         | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|    | 1    | 3 | 1 | 208 |   | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah       | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                        | -                               |                                       |   | 1                                      | 106.000.000         |  |                                      | -         | -      | -                | -                                 | 187.000.000         |   |
|    | 1    | 3 | 1 | 208 | 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                             |  |                                 |                                       |   |  |                     |  |                                      |           |        |                  |                                   |                     |   |
|    |      |   |   |     |   |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |                                 |                                       |   | 1 Laporan                              | 1.000.000           | Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang   | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | -      | -                |                                   | 10.000.000          | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|    | 1    | 3 | 1 | 208 | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik    |  |                                 |                                       |   |  |                     |  |                                      |           |        |                  |                                   |                     |   |
|    |      |   |   |     |   |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan |                                 |                                       |   | 1 Laporan                              | 75.000.000          | Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang   | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | -      | -                |                                   | 120.000.000         | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|    | 1    | 3 | 1 | 208 | 3 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor          |  |                                 |                                       |   |  |                     |  |                                      |           |        |                  |                                   |                     |   |

| No | Kode |   |   |     |   | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode Renstra PD | Realisasi Capaian RENJA PD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |  |  |           |        | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab      |
|----|------|---|---|-----|---|---|--|---------------------------------|---------------------------------------|---|--|---------------------|--|--|-----------|--------|------------------|-----------------------------------|---------------------|--|
|    |      |   |   |     |   |   |  |                                 |                                       |   | Target 2025                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi   | Sumber Dana  | Prioritas |        |                  | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |  |
|    |      |   |   |     |   |   |  |                                 |                                       |   |  |                     |  |  | Nasional  | Daerah |                  |                                   |                     |  |
| 1  | 2    |   |   |     |   | 3   | 4  | 5                               | 6                                     | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11   | 12        | 13     | 14               | 15                                | 16                  | 17                                     |
|    |      |   |   |     |   |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                       |                                 |                                       |   | 1 Laporan                              | 15.000.000          | Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                                     | -         | -      | -                |                                   | 32.000.000          | DINAS PEKERJAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|    | 1    | 3 | 1 | 208 | 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   |  |                                 |                                       |   |  |                     |  |  |           |        |                  |                                   |                     |  |
|    |      |   |   |     |   |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   |                                 |                                       |   | 1 Laporan                              | 15.000.000          | Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | -      | -                |                                   | 25.000.000          | DINAS PEKERJAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|    | 1    | 3 | 1 | 209 |   | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                       | -                               |                                       |   | 1                                      | 540.000.000         |  |  | -         | -      | -                | -                                 | 870.000.000         |  |
|    | 1    | 3 | 1 | 209 | 2 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |  |                                 |                                       |   |  |                     |  |  |           |        |                  |                                   |                     |  |
|    |      |   |   |     |   |   | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya |                                 |                                       |   | 30 Unit                                | 100.000.000         | Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                                     | -         | -      | -                |                                   | 50.000.000          | DINAS PEKERJAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|    | 1    | 3 | 1 | 209 | 3 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar                                       |  |                                 |                                       |   |  |                     |  |  |           |        |                  |                                   |                     |  |
|    |      |   |   |     |   |   | Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya  |                                 |                                       |   | 11 Unit                                | 200.000.000         | Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto                   | LAIN-LAIN PAD YAH, DANA  | -         | -      | -                |                                   | 460.000.000         | DINAS PEKERJAN UMUM DAN                |

| No | Kode |   |   |     |   | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                              | Target Akhir Periode Renstra PD | Realisasi Capaian RENJA PD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |   |  |           |        | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|------|---|---|-----|---|--|--|---------------------------------|---------------------------------------|---|--|---------------------|---|--|-----------|--------|------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------------|
|    |      |   |   |     |   |  |  |                                 |                                       |   | Target 2025                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi  | Sumber Dana  | Prioritas |        |                  | Target                            | Pagu Indikatif (Rp)                    |                                   |
|    |      |   |   |     |   |  |  |                                 |                                       |   |  |                     |   |  | Nasional  | Daerah |                  |                                   |  |                                   |
| 1  | 2    |   |   |     |   | 3  | 4  | 5                               | 6                                     | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11   | 12        | 13     | 14               | 15                                | 16                                     | 17                                |
|    |      |   |   |     |   |  |  |                                 |                                       |   |  |                     | Baru Simalang ang   | TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                              |           |        |                  |                                   |  | PENATAAN RUANG                    |
|    | 1    | 3 | 1 | 209 | 5 | Pemeliharaan Mebel   |  |                                 |                                       |   |  |                     |   |  |           |        |                  |                                   |  |                                   |
|    |      |   |   |     |   |  | Jumlah Mebel yang Dipelihara   |                                 |                                       |   | 50 Unit                                | 20.000.000          | Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalang ang  | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                         | -         | -      | -                | 0                                 | DINAS PEKERJAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |                                   |
|    | 1    | 3 | 1 | 209 | 6 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                     |  |                                 |                                       |   |  |                     |   |  |           |        |                  |                                   |  |                                   |
|    |      |   |   |     |   |  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                       |                                 |                                       |   | 11 Unit                                | 20.000.000          | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalang ang | LAIN-LAIN PAD YANG SAH, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | -      | -                | 60.000.000                        | DINAS PEKERJAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |                                   |
|    | 1    | 3 | 1 | 209 | 9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya |  |                                 |                                       |   |  |                     |   |  |           |        |                  |                                   |  |                                   |
|    |      |   |   |     |   |  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi |                                 |                                       |   | 1 Unit                                 | 200.000.000         | Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalang ang  | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                         | -         | -      | -                | 300.000.000                       | DINAS PEKERJAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |                                   |

| No | Kode |   |   |   |   | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode Renstra PD | Realisasi Capaian RENJA PD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |   |  |           |  | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab      |
|----|------|---|---|---|---|---|--|---------------------------------|---------------------------------------|---|--|---------------------|---|--|-----------|--|------------------|-----------------------------------|---------------------|--|
|    |      |   |   |   |   |   |  |                                 |                                       |   | Target 2025                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi  | Sumber Dana  | Prioritas |  |                  | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |  |
|    |      |   |   |   |   |   |  |                                 |                                       |   |  |                     |   |  | Nasional  | Daerah                                       |                  |                                   |                     |  |
| 1  | 2    |   |   |   |   | 3   | 4  | 5                               | 6                                     | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11   | 12        | 13   | 14               | 15                                | 16                  | 17                                     |
| 2  | 1    | 3 | 2 |   |   | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)   | Persentase luas daerah irigasi dalam kondisi baik  | -                               |                                       |   | 1                                      | 8.900.000.000       |   |  |           |  |                  | -                                 | 6.390.000.000       |  |
|    | 1    | 3 | 2 | 2 | 0 | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota            | Persentase Sumber Daya Air yang dikelola/ terpelihara  | -                               |                                       |   | 1                                      | 431.000.000         |   |  | -         | -  | -                | -                                 | 775.000.000         |  |
|    | 1    | 3 | 2 | 2 | 0 | Normalisasi/Restorasi Sungai  |  |                                 |                                       |   |  |                     |   |  |           |  |                  |                                   |                     |  |
|    |      |   |   |   |   |   | Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi  |                                 |                                       |   | 0 KM                                   | 0                   | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | -  | -         | -  | -                |                                   | 300.000.000         | DINAS PEKERJAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|    | 1    | 3 | 2 | 2 | 0 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai |  |                                 |                                       |   |  |                     |   |  |           |  |                  |                                   |                     |  |
|    |      |   |   |   |   |   | Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun |                                 |                                       |   | 2 Dokumen                              | 178.000.000         | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAN UMUM | -         | Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah | -                |                                   | 200.000.000         | DINAS PEKERJAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|    | 1    | 3 | 2 | 2 | 0 | Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya  |  |                                 |                                       |   |  |                     |   |  |           |  |                  |                                   |                     |  |
|    |      |   |   |   |   |   | Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun  |                                 |                                       |   | 1 Unit                                 | 253.000.000         | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAN UMUM | -         | Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah | -                |                                   | 275.000.000         | DINAS PEKERJAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |

| No | Kode |   |   |   |    | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                         | Target Akhir Periode Renstra PD | Realisasi Capaian RENJA PD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |   |  |           |  | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab      |
|----|------|---|---|---|----|--|---|---------------------------------|---------------------------------------|---|--|---------------------|---|--|-----------|--|------------------|-----------------------------------|---------------------|--|
|    |      |   |   |   |    |  |   |                                 |                                       |   | Target 2025                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi  | Sumber Dana  | Prioritas |  |                  | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |  |
|    |      |   |   |   |    |  |   |                                 |                                       |   |  |                     |   |  | Nasional  | Daerah                                       |                  |                                   |                     |  |
| 1  | 2    |   |   |   |    | 3  | 4   | 5                               | 6                                     | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11   | 12        | 13   | 14               | 15                                | 16                  | 17                                     |
|    | 1    | 3 | 2 | 2 | 02 | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase jaringan irigasi yang terkelola                          | -                               |                                       |   | 1                                      | 8.469.000.000       |   |  | -         | Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah | -                | -                                 | 5.615.000.000       |  |
|    | 1    | 3 | 2 | 2 | 02 | Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan   |   |                                 |                                       |   |  |                     |   |  |           |  |                  |                                   |                     |  |
|    |      |   |   |   |    |  | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan                |                                 |                                       |   | 0.833 KM                               | 1.192.555.000       | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAN UMUM | -         | Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah | -                |                                   | 1.250.000.000       | DINAS PEKERJAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|    | 1    | 3 | 2 | 2 | 02 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan  |   |                                 |                                       |   |  |                     |   |  |           |  |                  |                                   |                     |  |
|    |      |   |   |   |    |  | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi              |                                 |                                       |   | 2.20 KM                                | 4.969.725.900       | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAN UMUM | -         | Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah | -                |                                   | 2.800.000.000       | DINAS PEKERJAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|    | 1    | 3 | 2 | 2 | 02 | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan  |   |                                 |                                       |   |  |                     |   |  |           |  |                  |                                   |                     |  |
|    |      |   |   |   |    |  | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara |                                 |                                       |   | 0.900 KM                               | 1.847.500.000       | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAN UMUM | -         | Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah | -                |                                   | 1.100.000.000       | DINAS PEKERJAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|    | 1    | 3 | 2 | 2 | 35 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa   |   |                                 |                                       |   |  |                     |   |  |           |  |                  |                                   |                     |  |

| No | Kode |   |   |     |    | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                               | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode Renstra PD | Realisasi Capaian RENJA PD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |   |   |           |  | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab       |  |  |  |
|----|------|---|---|-----|----|--|---|---------------------------------|---------------------------------------|---|--|---------------------|---|---|-----------|--|------------------|-----------------------------------|---------------------|---|--|--|--|
|    |      |   |   |     |    |  |   |                                 |                                       |   | Target 2025                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi  | Sumber Dana   | Prioritas |  |                  | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |   |  |  |  |
|    |      |   |   |     |    |  |   |                                 |                                       |   |  |                     |   |   | Nasional  | Daerah   |                  |                                   |                     |   |  |  |  |
| 1  | 2    |   |   |     |    | 3  | 4   | 5                               | 6                                     | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11  | 12        | 13   | 14               | 15                                | 16                  | 17                                      |  |  |  |
|    |      |   |   |     | 02 |  |   |                                 |                                       |   |  |                     |   |   |           |  |                  |                                   |                     |   |  |  |  |
|    |      |   |   |     |    |  | Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun |                                 |                                       |   | 4 Dokumen                              | 459.219.100         | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM | -         | Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah   | -                |                                   | 465.000.000         | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |  |  |  |
| 3  | 1    | 3 | 3 |     |    | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM                         | Persentase rumah tangga yang memperoleh akses air minum   | -                               |                                       |   | 1                                      | 2.500.000.000       |   |   |           |  |                  | -                                 | 2.700.000.000       |   |  |  |  |
|    | 1    | 3 | 3 | 201 |    | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah rumah tangga yang mendapatkan layanan air bersih   | -                               |                                       |   | 600 rumah                              | 2.500.000.000       |   |   | -         | Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah | Masyarakat       | -                                 | 2.700.000.000       |   |  |  |  |
|    | 1    | 3 | 3 | 201 | 32 | Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan                          |   |                                 |                                       |   |  |                     |   |   |           |  |                  |                                   |                     |   |  |  |  |

| No | Kode |   |   |                  |        |  | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode Renstra PD | Realisasi Capaian RENJA PD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |   |   |           |  | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab       |
|----|------|---|---|------------------|--------|--|---|--|---------------------------------|---------------------------------------|---|--|---------------------|---|---|-----------|--|------------------|-----------------------------------|---------------------|---|
|    |      |   |   |                  |        |  |   |  |                                 |                                       |   | Target 2025                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi  | Sumber Dana   | Prioritas |  |                  | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |   |
|    |      |   |   |                  |        |  |   |  |                                 |                                       |   |  |                     |   |   | Nasional  | Daerah   |                  |                                   |                     |   |
| 1  | 2    |   |   |                  |        |  | 3   | 4  | 5                               | 6                                     | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11  | 12        | 13   | 14               | 15                                | 16                  | 17                                      |
|    |      |   |   |                  |        |  |   | Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan |                                 |                                       |   | 600 SR                                 | 2.500.000.000       | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM | -         | Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah | Masyarakat       |                                   | 2.700.000.000       | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 4  | 1    | 3 | 5 |                  |        |  | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH                              | Persentase rumah tangga yang memperoleh akses sanitasi yang layak  | -                               |                                       |   | 1                                      | 3.500.000.000       |   |   |           |  |                  | -                                 | 15.500.000.000      |   |
|    | 1    | 3 | 5 | 2<br>.<br>0<br>1 |        |  | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah rumah tangga yang memperoleh akses sanitasi yang layak  | -                               |                                       |   | 59386 rumah                            | 3.500.000.000       |   |   | -         | Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah | Masyarakat       | -                                 | 15.500.000.000      |   |
|    | 1    | 3 | 5 | 2<br>.<br>0<br>1 | 2<br>2 | Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman |   |  |                                 |                                       |   |  |                     |   |   |           |  |                  |                                   |                     |   |

| No | Kode |   |   |     |    |  | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra PD | Realisasi Capaian RENJA PD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |   |   |           |  | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab       |
|----|------|---|---|-----|----|--|--|---|---------------------------------|---------------------------------------|---|--|---------------------|---|---|-----------|--|------------------|-----------------------------------|---------------------|---|
|    |      |   |   |     |    |  |  |   |                                 |                                       |   | Target 2025                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi  | Sumber Dana   | Prioritas |  |                  | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |   |
|    |      |   |   |     |    |  |  |   |                                 |                                       |   |  |                     |   |   | Nasional  | Daerah   |                  |                                   |                     |   |
| 1  | 2    |   |   |     |    |  | 3  | 4   | 5                               | 6                                     | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11  | 12        | 13   | 14               | 15                                | 16                  | 17                                      |
|    |      |   |   |     |    |  | Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun |   |                                 |                                       |   | 22.5 M³/Hari                           | 3.500.000.000       | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM | -         | Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah | Masyarakat       |                                   | 4.500.000.000       | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|    | 1    | 3 | 5 | 201 | 36 | Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) |  |   |                                 |                                       |   |  |                     |   |   |           |  |                  |                                   |                     |   |
|    |      |   |   |     |    |  | Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun                                     |   |                                 |                                       |   | 0 M³/Hari                              | 0                   | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa           | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN                    | -         | Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah | Masyarakat       |                                   | 11.000.000.000      | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 5  | 1    | 3 | 6 |     |    | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | Persentase Saluran Drainase dalam kondisi baik   | -   |                                 |                                       |   | 1                                      | 2.700.000.000       |   |   |           |  |                  | -                                 | 1.700.000.000       |   |



| No | Kode |   |   |   |    | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan    | Target Akhir Periode Renstra PD | Realisasi Capaian RENJA PD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |   |                                      |           |  | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab       |
|----|------|---|---|---|----|--|--|---------------------------------|---------------------------------------|---|--|---------------------|---|--------------------------------------|-----------|--|------------------|-----------------------------------|---------------------|---|
|    |      |   |   |   |    |  |  |                                 |                                       |   | Target 2025                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi  | Sumber Dana                          | Prioritas |  |                  | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |   |
|    |      |   |   |   |    |  |  |                                 |                                       |   |  |                     |   |                                      | Nasional  | Daerah   |                  |                                   |                     |   |
| 1  | 2    |   |   |   |    | 3  | 4  | 5                               | 6                                     | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                                   | 12        | 13   | 14               | 15                                | 16                  | 17                                      |
|    | 1    | 3 | 6 | 2 | 01 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota | Panjang saluran drainase primer yg terbangun   | -                               |                                       |   | 6436 m                                 | 2.700.000.000       |   |                                      | -         | Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah | Masyarakat       | -                                 | 1.700.000.000       |   |
|    | 1    | 3 | 6 | 2 | 01 | Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan  |  |                                 |                                       |   |  |                     |   |                                      |           |  |                  |                                   |                     |   |
|    |      |   |   |   |    |  | Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun |                                 |                                       |   | 25 Sistem Drainase Perkotaan           | 2.700.000.000       | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah | Masyarakat       |                                   | 1.700.000.000       | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 6  | 1    | 3 | 8 |   |    | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG   | Persentase Bangunan Gedung yang layak          | -                               |                                       |   | 1                                      | 3.200.000.000       |   |                                      |           |  |                  | -                                 | 5.310.000.000       |   |

| No | Kode |   |   |   |    | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode Renstra PD | Realisasi Capaian RENJA PD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |   |                                      |           |  | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab       |
|----|------|---|---|---|----|--|--|---------------------------------|---------------------------------------|---|--|---------------------|---|--------------------------------------|-----------|--|------------------|-----------------------------------|---------------------|---|
|    |      |   |   |   |    |  |  |                                 |                                       |   | Target 2025                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi  | Sumber Dana                          | Prioritas |  |                  | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |   |
|    |      |   |   |   |    |  |  |                                 |                                       |   |  |                     |   |                                      | Nasional  | Daerah   |                  |                                   |                     |   |
| 1  | 2    |   |   |   |    | 3  | 4  | 5                               | 6                                     | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                                   | 12        | 13   | 14               | 15                                | 16                  | 17                                      |
|    | 1    | 3 | 8 | 2 | 01 | Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung  | Jumlah gedung yang dibangun dan ditingkatkan | -                               |                                       |   | 39 Unit                                | 3.200.000.000       |   |                                      | -         | Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah | -                | -                                 | 5.310.000.000       |   |
|    | 1    | 3 | 8 | 2 | 01 | Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota   |  |                                 |                                       |   |  |                     |   |                                      |           |  |                  |                                   |                     |   |
|    |      |   |   |   |    | Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota  |  |                                 |                                       |   | 3 Dokumen                              | 3.000.000.000       | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah | -                |                                   | 5.100.000.000       | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|    | 1    | 3 | 8 | 2 | 03 | Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG |  |                                 |                                       |   |  |                     |   |                                      |           |  |                  |                                   |                     |   |

| No | Kode |   |    |     |    | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode Renstra PD | Realisasi Capaian RENJA PD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |  |  |           |  | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab      |
|----|------|---|----|-----|----|--|---|---------------------------------|---------------------------------------|---|--|---------------------|--|--|-----------|--|------------------|-----------------------------------|---------------------|--|
|    |      |   |    |     |    |  |   |                                 |                                       |   | Target 2025                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi   | Sumber Dana  | Prioritas |  |                  | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |  |
|    |      |   |    |     |    |  |   |                                 |                                       |   |  |                     |  |  | Nasional  | Daerah   |                  |                                   |                     |  |
| 1  | 2    |   |    |     |    | 3  | 4   | 5                               | 6                                     | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11   | 12        | 13   | 14               | 15                                | 16                  | 17                                     |
|    |      |   |    |     |    |  | Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG |                                 |                                       |   | 250 Dokumen                            | 200.000.000         | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa | LAIN-LAIN PAD YANG SAH, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah | -                |                                   | 210.000.000         | DINAS PEKERJAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 7  | 1    | 3 | 10 |     |    | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN  | Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap   | -                               |                                       |   | 1                                      | 36.649.719.100      |  |  |           |  | -                | -                                 | 51.100.000.000      |  |
|    | 1    | 3 | 10 | 201 |    | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota   | Panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap  | -                               |                                       |   | 676,47 Km                              | 36.649.719.100      |  |  | -         | Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah   | -                | -                                 | 51.100.000.000      |  |
|    | 1    | 3 | 10 | 201 | 29 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan |   |                                 |                                       |   |  |                     |  |  |           |  |                  |                                   |                     |  |
|    |      |   |    |     |    |  | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun   |                                 |                                       |   | 6 Dokumen                              | 600.000.000         | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAN UMUM       | -         | Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah   | -                |                                   | 600.000.000         | DINAS PEKERJAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|    | 1    | 3 | 10 | 201 | 31 | Penggantian Jembatan   |   |                                 |                                       |   |  |                     |  |  |           |  |                  |                                   |                     |  |

| No | Kode |   |    |     |    | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra PD | Realisasi Capaian RENJA PD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |   |   |           |  | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab      |
|----|------|---|----|-----|----|--|---|---------------------------------|---------------------------------------|---|--|---------------------|---|---|-----------|--|------------------|-----------------------------------|---------------------|--|
|    |      |   |    |     |    |  |   |                                 |                                       |   | Target 2025                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi  | Sumber Dana   | Prioritas |  |                  | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |  |
|    |      |   |    |     |    |  |   |                                 |                                       |   |  |                     |   |   | Nasional  | Daerah                                       |                  |                                   |                     |  |
| 1  | 2    |   |    |     |    | 3  | 4   | 5                               | 6                                     | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11  | 12        | 13   | 14               | 15                                | 16                  | 17                                     |
|    |      |   |    |     |    |  | Jumlah Jembatan yang Diganti                |                                 |                                       |   | 1 Jembatan                             | 4.000.000.000       | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAN UMUM  | -         | Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah | -                |                                   | 5.000.000.000       | DINAS PEKERJAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|    | 1    | 3 | 10 | 201 | 32 | Pembangunan Jalan  |   |                                 |                                       |   |  |                     |   |   |           |  |                  |                                   |                     |  |
|    |      |   |    |     |    |  | Panjang Jalan yang Dibangun                 |                                 |                                       |   | 2.5 KM                                 | 5.000.000.000       | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAN UMUM  | -         | Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah | -                |                                   | 2.000.000.000       | DINAS PEKERJAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|    | 1    | 3 | 10 | 201 | 33 | Rekonstruksi Jalan   |   |                                 |                                       |   |  |                     |   |   |           |  |                  |                                   |                     |  |
|    |      |   |    |     |    |  | Panjang Jalan yang Direkonstruksi           |                                 |                                       |   | 4 KM                                   | 12.049.719.100      | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAN UMUM, DBH SAWIT | -         | Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah | -                |                                   | 25.000.000.000      | DINAS PEKERJAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|    | 1    | 3 | 10 | 201 | 34 | Pemeliharaan Berkala Jalan                                 |   |                                 |                                       |   |  |                     |   |   |           |  |                  |                                   |                     |  |

| No | Kode |   |    |     |    | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan    | Target Akhir Periode Renstra PD | Realisasi Capaian RENJA PD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |  |  |           |  | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab      |  |
|----|------|---|----|-----|----|--|--|---------------------------------|---------------------------------------|---|--|---------------------|--|--|-----------|--|------------------|-----------------------------------|---------------------|--|--|
|    |      |   |    |     |    |  |  |                                 |                                       |   | Target 2025                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi   | Sumber Dana  | Prioritas |  |                  | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |  |  |
|    |      |   |    |     |    |  |  |                                 |                                       |   |  |                     |  |  | Nasional  | Daerah                                       |                  |                                   |                     |  |  |
| 1  | 2    |   |    |     |    | 3  | 4  | 5                               | 6                                     | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11   | 12        | 13   | 14               | 15                                | 16                  | 17                                     |  |
|    |      |   |    |     |    |  | Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala   |                                 |                                       |   | 3 KM                                   | 6.000.000.000       | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PEKERJAN UMUM            | -         | Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah | -                |                                   | 10.000.000.000      | DINAS PEKERJAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |  |
|    | 1    | 3 | 10 | 201 | 38 | Pemeliharaan Rutin Jembatan                                |  |                                 |                                       |   |  |                     |  |  |           |  |                  |                                   |                     |  |  |
|    |      |   |    |     |    |  | Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin   |                                 |                                       |   | 5 Jembatan                             | 1.000.000.000       | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PEKERJAN UMUM, DBH SAWIT | -         | Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah | -                |                                   | 500.000.000         | DINAS PEKERJAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |  |
|    | 1    | 3 | 10 | 201 | 40 | Pembangunan Jembatan                                       |  |                                 |                                       |   |  |                     |  |  |           |  |                  |                                   |                     |  |  |
|    |      |   |    |     |    |  | Jumlah Jembatan yang Dibangun                  |                                 |                                       |   | 1 Jembatan                             | 4.000.000.000       | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PEKERJAN UMUM            | -         | Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah | -                |                                   | 5.000.000.000       | DINAS PEKERJAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |  |
|    | 1    | 3 | 10 | 201 | 42 | Pemeliharaan Berkala Jembatan                              |  |                                 |                                       |   |  |                     |  |  |           |  |                  |                                   |                     |  |  |
|    |      |   |    |     |    |  | Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala |                                 |                                       |   | 5 Jembatan                             | 1.000.000.000       | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PEKERJAN UMUM            | -         | Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah | -                |                                   | 500.000.000         | DINAS PEKERJAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |  |

| No | Kode |   |    |     |    | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode Renstra PD | Realisasi Capaian RENJA PD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |  |  |           |  | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab      |  |  |  |
|----|------|---|----|-----|----|---|---|---------------------------------|---------------------------------------|---|--|---------------------|--|--|-----------|--|------------------|-----------------------------------|---------------------|--|--|--|--|
|    |      |   |    |     |    |   |   |                                 |                                       |   | Target 2025                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi   | Sumber Dana  | Prioritas |  |                  | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |  |  |  |  |
|    |      |   |    |     |    |   |   |                                 |                                       |   |  |                     |  |  | Nasional  | Daerah                                       |                  |                                   |                     |  |  |  |  |
| 1  | 2    |   |    |     |    | 3   | 4   | 5                               | 6                                     | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11   | 12        | 13   | 14               | 15                                | 16                  | 17                                     |  |  |  |
|    |      |   |    |     |    |   |   |                                 |                                       |   |  |                     |  | AN UMUM  |           |  |                  |                                   |                     |  |  |  |  |
|    | 1    | 3 | 10 | 201 | 46 | Pemeliharaan Rutin Jalan  |   |                                 |                                       |   |  |                     |  |  |           |  |                  |                                   |                     |  |  |  |  |
|    |      |   |    |     |    |   | Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin  |                                 |                                       |   | 40 KM                                  | 3.000.000.000       | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAN UMUM             | -         | Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah | -                |                                   | 2.500.000.000       | DINAS PEKERJAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |  |  |  |
| 8  | 1    | 3 | 11 |     |    | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI  | Persentase Lembaga Konstruksi yang terbina  | -                               |                                       |   | 1                                      | 400.000.000         |  |  |           |  | -                |                                   | 112.000.000         |  |  |  |  |
|    | 1    | 3 | 11 | 201 |    | Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi  | Jumlah sertifikat keahlian yang diterbitkan   | -                               |                                       |   | 63 Sertifikat                          | 165.000.000         |  |  | -         | -  | -                | -                                 | 35.000.000          |  |  |  |  |
|    | 1    | 3 | 11 | 201 | 10 | Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis |   |                                 |                                       |   |  |                     |  |  |           |  |                  |                                   |                     |  |  |  |  |
|    |      |   |    |     |    |   | Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi |                                 |                                       |   | 30 Orang                               | 100.000.000         | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | -  | -                |                                   | 17.500.000          | DINAS PEKERJAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |  |  |  |
|    | 1    | 3 | 11 | 201 | 11 | Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi                                     |   |                                 |                                       |   |  |                     |  |  |           |  |                  |                                   |                     |  |  |  |  |
|    |      |   |    |     |    |   | Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya  |                                 |                                       |   | 1 Lembaga                              | 65.000.000          | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                               | -         | -  | -                |                                   | 17.500.000          | DINAS PEKERJAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |  |  |  |
|    | 1    | 3 | 11 | 202 |    | Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota                      | Persentase Informasi Jasa Konstruksi di Kabupaten Lima Puluh Kota   | -                               |                                       |   | 1                                      | 75.000.000          |  |  | -         | -  | -                | -                                 | 35.000.000          |  |  |  |  |

| N<br>o | Kode |   |    |     |    | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                    | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode Renstra PD | Realisasi Capaian RENJA PD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |   |                                      |           |        | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab       |  |  |  |  |
|--------|------|---|----|-----|----|---|--|---------------------------------|---------------------------------------|---|--|---------------------|---|--------------------------------------|-----------|--------|------------------|-----------------------------------|---------------------|---|--|--|--|--|
|        |      |   |    |     |    |   |  |                                 |                                       |   | Target 2025                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi  | Sumber Dana                          | Prioritas |        |                  | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |   |  |  |  |  |
|        |      |   |    |     |    |   |  |                                 |                                       |   |  |                     |   |                                      | Nasional  | Daerah |                  |                                   |                     |   |  |  |  |  |
| 1      | 2    |   |    |     |    | 3   | 4  | 5                               | 6                                     | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                                   | 12        | 13     | 14               | 15                                | 16                  | 17                                      |  |  |  |  |
|        | 1    | 3 | 11 | 202 | 12 | Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi                              |  |                                 |                                       |   |  |                     |   |                                      |           |        |                  |                                   |                     |   |  |  |  |  |
|        |      |   |    |     |    |   | Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan                                   |                                 |                                       |   | 1 Perangkat Pendukung                  | 50.000.000          | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | -      | -                |                                   | 20.000.000          | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |  |  |  |  |
|        | 1    | 3 | 11 | 202 | 13 | Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota                          |  |                                 |                                       |   |  |                     |   |                                      |           |        |                  |                                   |                     |   |  |  |  |  |
|        |      |   |    |     |    |   | Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan                       |                                 |                                       |   | 4 Dokumen                              | 25.000.000          | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | -      | -                |                                   | 15.000.000          | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |  |  |  |  |
|        | 1    | 3 | 11 | 204 |    | Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi        | Persentase Monitoring dan evaluasi kegiatan Jasa Konstruksi  | -                               |                                       |   | 1                                      | 160.000.000         |   |                                      | -         | -      | -                | -                                 | 42.000.000          |   |  |  |  |  |
|        | 1    | 3 | 11 | 204 | 4  | Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota                 |  |                                 |                                       |   |  |                     |   |                                      |           |        |                  |                                   |                     |   |  |  |  |  |
|        |      |   |    |     |    |   | Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan       |                                 |                                       |   | 9 Paket Pekerjaan                      | 66.000.000          | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | -      | -                |                                   | 15.000.000          | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |  |  |  |  |
|        | 1    | 3 | 11 | 204 | 6  | Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi |  |                                 |                                       |   |  |                     |   |                                      |           |        |                  |                                   |                     |   |  |  |  |  |
|        |      |   |    |     |    |   | Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk |                                 |                                       |   | 2 Lembaga                              | 72.000.000          | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | -      | -                |                                   | 12.000.000          | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |  |  |  |  |

**Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025**

| No | Kode |   |    |     |    |  | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                     | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                               | Target Akhir Periode Renstra PD | Realisasi Capaian RENJA PD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |   |                                      |           |        | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab      |  |  |  |
|----|------|---|----|-----|----|--|--|---|---------------------------------|---------------------------------------|---|--|---------------------|---|--------------------------------------|-----------|--------|------------------|-----------------------------------|---------------------|--|--|--|--|
|    |      |   |    |     |    |  |  |   |                                 |                                       |   | Target 2025                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi  | Sumber Dana                          | Prioritas |        |                  | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |  |  |  |  |
|    |      |   |    |     |    |  |  |   |                                 |                                       |   |  |                     |   |                                      | Nasional  | Daerah |                  |                                   |                     |  |  |  |  |
| 1  | 2    |   |    |     |    |  | 3  | 4   | 5                               | 6                                     | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                                   | 12        | 13     | 14               | 15                                | 16                  | 17                                     |  |  |  |
|    | 1    | 3 | 11 | 204 | 7  |  | Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota                            |   |                                 |                                       |   |  |                     |   |                                      |           |        |                  |                                   |                     |  |  |  |  |
|    |      |   |    |     |    |  | Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha     |   |                                 |                                       |   | 9 Badan Usaha                          | 22.000.000          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | -      | -                |                                   | 15.000.000          | DINAS PEKERJAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |  |  |  |
| 9  | 1    | 3 | 12 |     |    |  | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG   | Persentase ketaatan terhadap RTRW   | -                               |                                       |   | 1                                      | 1.900.000.000       |   |                                      |           |        |                  | -                                 | 480.000.000         |  |  |  |  |
|    | 1    | 3 | 12 | 201 |    |  | Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota | Jumlah ditetapkan Peraturan Daerah RTRW dan Peraturan Daerah RDTR Kawasan | -                               |                                       |   | 1 dokumen                              | 1.600.000.000       |   |                                      | -         | -      | -                | -                                 | 360.000.000         |  |  |  |  |
|    | 1    | 3 | 12 | 201 | 6  |  | Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota  |   |                                 |                                       |   |  |                     |   |                                      |           |        |                  |                                   |                     |  |  |  |  |
|    |      |   |    |     |    |  | Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota                          |   |                                 |                                       |   | 2 Dokumen                              | 1.600.000.000       | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | -      | -                |                                   | 250.000.000         | DINAS PEKERJAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |  |  |  |
|    | 1    | 3 | 12 | 201 | 13 |  | Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang                   |   |                                 |                                       |   |  |                     |   |                                      |           |        |                  |                                   |                     |  |  |  |  |
|    |      |   |    |     |    |  | Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.   |   |                                 |                                       |   | 0 Laporan                              | 0                   | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | -      | -                |                                   | 110.000.000         | DINAS PEKERJAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |  |  |  |
|    | 1    | 3 | 12 | 202 |    |  | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota                       | Jumlah perencanaan tata ruang yang telah ada                              | -                               |                                       |   | 11 Dokumen                             | 0                   |   |                                      | -         | -      | -                | -                                 | 0                   |  |  |  |  |



| No | Kode |    |    |     |   | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode Renstra PD | Realisasi Capaian RENJA PD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |  |                                      |           |        | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab       |  |             |  |
|----|------|----|----|-----|---|--|--|---------------------------------|---------------------------------------|---|--|---------------------|--|--------------------------------------|-----------|--------|------------------|-----------------------------------|---------------------|---|--|-------------|--|
|    |      |    |    |     |   |  |  |                                 |                                       |   | Target 2025                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi   | Sumber Dana                          | Prioritas |        |                  | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |   |  |             |  |
|    |      |    |    |     |   |  |  |                                 |                                       |   |  |                     |  |                                      | Nasional  | Daerah |                  |                                   |                     |   |  |             |  |
| 1  | 2    |    |    |     |   | 3  | 4  | 5                               | 6                                     | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                                   | 12        | 13     | 14               | 15                                | 16                  | 17                                      |  |             |  |
|    | 1    | 3  | 12 | 202 | 5 | Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota   |  |                                 |                                       |   |  |                     |  |                                      |           |        |                  |                                   |                     |   |  |             |  |
|    |      |    |    |     |   |  | Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota  |                                 |                                       |   | 0 Dokumen                              | 0                   | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | -      | -                |                                   | 0                   | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |  |             |  |
|    | 1    | 3  | 12 | 203 |   | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota                                | Jumlah pemanfaatan tata ruang yang telah sesuai  | -                               |                                       |   | 20 Lokasi                              | 250.000.000         |  |                                      | -         | -      | -                | -                                 | 60.000.000          |   |  |             |  |
|    | 1    | 3  | 12 | 203 | 4 | Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang                                      |  |                                 |                                       |   |  |                     |  |                                      |           |        |                  |                                   |                     |   |  |             |  |
|    |      |    |    |     |   |  | Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku                     |                                 |                                       |   | 8 Layanan                              | 250.000.000         | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | -      | -                |                                   | 60.000.000          | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |  |             |  |
|    | 1    | 3  | 12 | 204 |   | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota                   | Jumlah pemanfaatan Ruang yang dapat dikendalikan   | -                               |                                       |   | 2 Lokasi                               | 50.000.000          |  |                                      | -         | -      | -                | -                                 | 60.000.000          |   |  |             |  |
|    | 1    | 3  | 12 | 204 | 8 | Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK |  |                                 |                                       |   |  |                     |  |                                      |           |        |                  |                                   |                     |   |  |             |  |
|    |      |    |    |     |   |  | Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang |                                 |                                       |   | 1 Dokumen                              | 50.000.000          | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | -      | -                |                                   | 60.000.000          | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |  |             |  |
|    | 2    |    |    |     |   | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                              |  |                                 |                                       |   |  |                     |  |                                      |           |        | 400.000.000      |                                   |                     |   |  | 465.000.000 |  |
|    | 2    | 10 |    |     |   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN  |  |                                 |                                       |   |  |                     |  |                                      |           |        | 400.000.000      |                                   |                     |   |  | 465.000.000 |  |
| 10 | 2    | 10 | 4  |     |   | PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN  | Persentase fasilitasi penyelesaian sengketa tanah garapan                                      | -                               |                                       |   | 1                                      | 300.000.000         |  |                                      |           |        |                  | -                                 | 210.000.000         |   |  |             |  |
|    | 2    | 1  | 4  | 2   |   | Penyelesaian Sengketa Tanah  | Jumlah penyelesaian sengketa tanah   | -                               |                                       |   | 3 Kasus                                | 300.000.000         |  |                                      | -         | -      | -                | -                                 | 210.000.00          |   |  |             |  |

**Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025**

| No | Kode |   |   |   |   | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode Renstra PD | Realisasi Capaian RENJA PD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |   |   |           |        | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab       |   |  |
|----|------|---|---|---|---|--|---|---------------------------------|---------------------------------------|---|--|---------------------|---|---|-----------|--------|------------------|-----------------------------------|---------------------|---|---|--|
|    |      |   |   |   |   |  |   |                                 |                                       |   | Target 2025                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi  | Sumber Dana   | Prioritas |        |                  | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |   |   |  |
|    |      |   |   |   |   |  |   |                                 |                                       |   |  |                     |   |   | Nasional  | Daerah |                  |                                   |                     |   |   |  |
| 1  | 2    |   |   |   |   | 3  | 4   | 5                               | 6                                     | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11  | 12        | 13     | 14               | 15                                | 16                  | 17                                      |   |  |
|    |      | 0 |   | 0 | 1 | Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota  | garapan di Kabupaten Lima Puluh Kota yang difasilitasi  |                                 |                                       |   |  |                     |   |   |           |        |                  |                                   | 0                   |   |   |  |
|    | 2    | 1 | 0 | 4 | 2 | Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota  |   |                                 |                                       |   |  |                     |   |   |           |        |                  |                                   |                     |   | 0 |  |
|    |      |   |   |   |   |  | Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota   |                                 |                                       |   | 1 Dokumen                              | 300.000.000         | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM  | -         | -      | -                |                                   | 210.000.000         | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |   |  |
| 11 | 2    | 1 | 0 | 5 |   | PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN   | Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan   | -                               |                                       |   | 0                                      | 100.000.000         |   |   |           |        | -                |                                   | 255.000.000         |   |   |  |
|    | 2    | 1 | 0 | 5 | 2 | Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                             | Jumlah Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan yang difasilitasi   | -                               |                                       |   | 2 Kasus                                | 100.000.000         |   |   | -         | -      | -                | -                                 | 255.000.000         |   |   |  |
|    | 2    | 1 | 0 | 5 | 2 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota |   |                                 |                                       |   |  |                     |   |   |           |        |                  |                                   |                     |   |   |  |
|    |      |   |   |   |   |  | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota |                                 |                                       |   | 0 Dokumen                              | 0                   | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM  | -         | -      | -                |                                   | 45.000.000          | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |   |  |
|    | 2    | 1 | 0 | 5 | 2 | Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                   |   |                                 |                                       |   |  |                     |   |   |           |        |                  |                                   |                     |   |   |  |
|    |      |   |   |   |   |  | Jumlah Laporan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota                    |                                 |                                       |   | 1 Laporan                              | 100.000.000         | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, SISA LEBIH PERHITUN | -         | -      | -                |                                   | 210.000.000         | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |   |  |

**Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025**

| No | Kode        |  |  |  |  |  | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra PD | Realisasi Capaian RENJA PD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |        |                           |           |        | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|-------------|--|--|--|--|--|--|---|---------------------------------|---------------------------------------|---|--|---------------------|--------|---------------------------|-----------|--------|------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |             |  |  |  |  |  |  |   |                                 |                                       |   | Target 2025                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana               | Prioritas |        |                  | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |
|    |             |  |  |  |  |  |  |   |                                 |                                       |   |  |                     |        |                           | Nasional  | Daerah |                  |                                   |                     |                                   |
| 1  | 2           |  |  |  |  |  | 3  | 4   | 5                               | 6                                     | 7   | 8                                      | 9                   | 10     | 11                        | 12        | 13     | 14               | 15                                | 16                  | 17                                |
|    |             |  |  |  |  |  |  |   |                                 |                                       |   |  |                     |        | ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA |           |        |                  |                                   |                     |                                   |
|    | J U M L A H |  |  |  |  |  |  |   |                                 |                                       |   |  | 70.282.341.302      |        |                           |           |        |                  |                                   | 94.059.000.000      |                                   |

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Renja Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang ini disusun mengacu pada RPJMD tahun 2021-2026 dan Renstra Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang 2021-2026.


Renja Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang memuat hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan Renja tahun lalu, permasalahan dan rumusan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pengguna anggaran dan pejabat pelaksana teknis kegiatan pada tahun yang akan datang.

Keberhasilan pelaksanaan Renja Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang sangat ditentukan oleh peran aktif seluruh jajaran pimpinan dan personil Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang. Untuk itu diperlukan sikap mental, tekad, semangat, dan kekuatan serta disiplin semua unsur Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang, dengan cara memberi dukungan penuh terhadap pelaksanaan program serta kegiatan sesuai dengan fungsi dan kemampuan masing-masing.

Keberhasilan pelaksanaan Renja Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang juga sangat tergantung kepada keseriusan segenap unsur Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam menyiapkan peraturan-peraturan yang akan menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan program dan kegiatan serta dalam penataan pengelolaan program dan kegiatan tersebut selama satu tahun yang akan datang, baik dari segi tata kelola sumber daya manusia, tata kelola anggaran yang telah dialokasikan maupun tata kelola peralatan/perlengkapan.

Diharapkan pada awal tahun anggaran berjalan atau awal tahun 2025, seluruh kebutuhan pelaksanaan program/kegiatan tersebut sudah dapat diselesaikan.

Demikian Renja Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 disusun, semoga mampu meningkatkan kinerja Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun yang akan datang.

  
BUPATI LIMA PULUH KOTA  
SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO